



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA MAKASSAR

PUSTAKA
SAWERIGDING



MUSLIMIN A.R. EFFENDY • SIMON SIRUA SARAPANG

SONDERAFDEELING

MAROS

KONFIGURASI ELITE &
KONTESTASI KEKUASAAN
1900-1946

irektorat
dayaan

361.0072

SIM

0

ONDERAFDEELING
MAROS
KONFIGURASI ELITE &
KONTESTASI KEKUASAAN
1900-1946

Sanksi Pelanggaran Hak Cipta

Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta dan pemegang hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



SIMON SIRUA SARAPANG

ONDERAFDEELING

MAROS

KONFIGURASI ELITE &
KONTESTASI KEKUASAAN
1900-1946

jumlah : xix + 108 halaman
ukuran : 20,5 x 14 cm
font : Book Antiqua 11 pt

ONDERAFDEELING MAROS KONFIGURASI ELITE DAN KONTESTASI KEKUASAAN 1900-1946

Penulis : Simon Sirua Sarapang
Editor : DR. Edward L. Poelinggomang
Layouter : SawerigadingART

Sumber foto: <http://flickriver-16-1710691658.us-east-1.elb.amazonaws.com/photos/125605764@N04/14493632635/>

Hak Cipta @ 2016 pada Penulis
Hak Penerbitan pada Pustaka Sawerigading
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
All Rights Reserved

pustakasawerigading.ia@gmail.com
Anggota IKAPI

Cetakan Pertama, Januari 2016

diterbitkan atas kerjasama
Pustaka Sawerigading dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar

ISBN 978-602-9248-36-4

PENGANTAR PENERBIT



Buku tentang keberadaan Maros pada masa lalu, terlebih kajian khusus tentang bagaimana konfigurasi elite dan kontestasi kekuasaan antara tahun 1900-1946 memang harus diakui masih belum ada. Hal ini dapat dimaklumi, antara lain, mengingat secara geografis, Maros sangat berdekatan dengan Makassar yang merupakan pusat kekuasaan Kerajaan Gowa-Tallo yang sejak dahulu menjadi perhatian dari berbagai belahan dunia, bahkan hingga kini setelah menjadi ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menjadikan para penulis pada masa lalu hanya terfokus pada Kerajaan Makassar dan beberapa kerajaan-kerajaan besar lainnya di Sulawesi Selatan. Dengan demikian, sumber-sumber yang akurat untuk melakukan studi tentang Maros, khususnya berkaitan dengan judul buku ini memang mengalami kendala yang cukup berarti.

Kendati demikian, dengan berbagai usaha yang dilakukan, penulis berhasil mendapatkan sumber-sumber yang relevan dengan kajian yang akan dilakukannya. Bahan-bahan arsip yang kemudian menjadi sumber primernya antara lain: surat keputusan (*besluit*) dan laporan politik pemerintah Hindia

Belanda yang tertuang dalam *Politiek Verslag van Timor en Onderhoorigheden*. Laporan politik (*Politiek Verslag*) dan laporan kolonial (*Kolonial Verslag*) yang disusun secara periodik antara tahun 1907-1915, dan surat kabar yang terbit secara rutin antara tahun 1900-1931 yang kini menjadi koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Jakarta.

Dalam catatan penulis, kehadiran buku ini salah satunya dimaksudkan untuk mengembangkan kajian sejarah politik lokal dengan fokus pada dinamika dan kontestasi politik antarelite. Pendekatan yang lebih “berorientasi ke dalam” (*more endogenously oriented*) ini memperlihatkan karakteristik yang amat variatif, antara sekutu dan seteru, integrasi dan perubahan. Penulis melihat, dalam proses integrasi terjadi pertarungan (kontestasi) kepentingan antarelite yang berakibat pada munculnya ketidakharmonisan hubungan antarelite dan antarrakyat sehingga terjadi transformasi politik dan sosial.

Olehnya itu, Penerbit Pustaka Sawerigading menganggap penting untuk menerbitkan karya ini, salah satunya untuk mengisi kelangkaan buku tentang Maros, khususnya yang mengulas tentang konfigurasi elite dan kontestasi kekuasaan dalam kurun waktu 1900-1946. Semoga bermanfaat.

PENERBIT

PENGANTAR PENULIS



Studi mengenai sejarah Maros memang belum banyak dilakukan oleh para sejarawan. Historisitas mengenai daerah yang ketika periode pemerintah Hindia Belanda ini menjadi bagian dari Distrik Utara (*Noorder Districten*) hanya berlandaskan kepada beberapa laporan dan buku yang kebanyakan diantaranya menyajikan sisi potensi tinggalan artefaktual berupa benda dan struktur cagar budaya (khususnya gua-gua prasejarah), historiografi model “sejarah daerah”, dan tulisan pendek yang secara spesifik membahas mengenai Kekaraengan Bontoa. Laporan dan buku tersebut sangat bermanfaat untuk membuka jalan bagi upaya penjelasan lebih lanjut dan mengisi kekosongan dari periode tertentu dalam sejarah lokal di Sulawesi Selatan.

Buku ini merupakan upaya kecil untuk menjelaskan bagian yang tersisa atau bahkan terabaikan dalam khasanah penulisan sejarah Indonesia, yaitu eksistensi masyarakat adat yang mewujud dalam terminologi kolonial sebagai distrik-distrik (yang dipimpin oleh *regen*), yang kemudian menjadi federasi-federasi di *Onderafdeeling* Maros di tahun 1900 hingga 1946.

Dalam penelitian hingga penulisan buku ini, penulis

Belanda yang tertuang dalam *Politiek Verslag van Timor en Onderhoorigheden*. Laporan politik (*Politiek Verslag*) dan laporan kolonial (*Kolonial Verslag*) yang disusun secara periodik antara tahun 1907-1915, dan surat kabar yang terbit secara rutin antara tahun 1900-1931 yang kini menjadi koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Jakarta.

Dalam catatan penulis, kehadiran buku ini salah satunya dimaksudkan untuk mengembangkan kajian sejarah politik lokal dengan fokus pada dinamika dan kontestasi politik antarelite. Pendekatan yang lebih “berorientasi ke dalam” (*more endogenously oriented*) ini memperlihatkan karakteristik yang amat variatif, antara sekutu dan seteru, integrasi dan perubahan. Penulis melihat, dalam proses integrasi terjadi pertarungan (kontestasi) kepentingan antarelite yang berakibat pada munculnya ketidakharmonisan hubungan antarelite dan antarrakyat sehingga terjadi transformasi politik dan sosial.

Olehnya itu, Penerbit Pustaka Sawerigading menganggap penting untuk menerbitkan karya ini, salah satunya untuk mengisi kelangkaan buku tentang Maros, khususnya yang mengulas tentang konfigurasi elite dan kontestasi kekuasaan dalam kurun waktu 1900-1946. Semoga bermanfaat.

PENERBIT

PENGANTAR PENULIS



Studi mengenai sejarah Maros memang belum banyak dilakukan oleh para sejarawan. Historisitas mengenai daerah yang ketika periode pemerintah Hindia Belanda ini menjadi bagian dari Distrik Utara (*Noorder Districten*) hanya berlandaskan kepada beberapa laporan dan buku yang kebanyakan diantaranya menyajikan sisi potensi tinggalan artefaktual berupa benda dan struktur cagar budaya (khususnya gua-gua prasejarah), historiografi model “sejarah daerah”, dan tulisan pendek yang secara spesifik membahas mengenai Kekaraengan Bontoa. Laporan dan buku tersebut sangat bermanfaat untuk membuka jalan bagi upaya penjelasan lebih lanjut dan mengisi kekosongan dari periode tertentu dalam sejarah lokal di Sulawesi Selatan.

Buku ini merupakan upaya kecil untuk menjelaskan bagian yang tersisa atau bahkan terabaikan dalam khasanah penulisan sejarah Indonesia, yaitu eksistensi masyarakat adat yang mewujud dalam terminologi kolonial sebagai distrik-distrik (yang dipimpin oleh regen), yang kemudian menjadi federasi-federasi di *Onderafdeeling* Maros di tahun 1900 hingga 1946.

Dalam penelitian hingga penulisan buku ini, penulis

menerima banyak bantuan dari beberapa lembaga dan pribadi. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada BPNB Makassar. Terima kasih pula kepada beberapa informan, yang dengan sukarela meluangkan waktunya untuk berbagi informasi dan berdiskusi dengan peneliti, di antaranya adalah Bapak Andi Abdul Waris Tadjuddin Karaeng Sioja (pewaris tahta dan pemangku adat Kekaraengan Marusu yang ke-23) bersama ibu, Bapak Andi Muhammad Ilyas, dan Andi Baso bersama ibu (Laiya-Cenrana), dan Nur Asma (Barandasi).

Terima kasih pula kepada staf bagian Pelayanan dan Informasi Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta, staf bagian layanan publik untuk terbitan Majalah dan Koran Lama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta, dan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar yang dengan ketelitian dan kesabarannya membantu mencari dan menggandakan beberapa bahan arsip dan dokumen yang diperlukan.

Meskipun buku ini mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak namun, tanggungjawab terhadap isi sepenuhnya berada di tangan penulis.

Diperlukan kajian lanjutan untuk mengungkap dinamika politik dan kontestasi kekuasaan antarelite di Onderafdeeling Maros dalam kurun waktu 1900-1946, dan periode 1947-1950. Semoga buku ini bermanfaat.

Makassar, 20 September 2015

Simon Sirua Sarapang



PENGANTAR EDITOR

Maros pada awalnya dikenal sebagai satu kerajaan dengan sebutan Kerajaan Marusu. Kerajaan ini menjalin kerjasama dengan Kerajaan dan Kerajaan Polombangkeng. Persekutuan tiga kerajaan ini, dalam perkembangannya terlibat dalam perang dengan Kerajaan Gowa. Perang itu berkaitan dengan keinginan Kerajaan Gowa untuk ikut mengembangkan diri dalam dunia perdagangan maritim yang ketika itu berkembang pesat.

Perkembangan itu disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, disebabkan oleh keberhasilan pedagang-pedagang Portugis merebut dan menduduki pusat perdagangan dari Zona Perdagangan Selat Malaka di Kota Malaka. *Kedua*, adalah para pedagang Melayu yang sebelumnya menjadikan Kota Malaka sebagai pusat kegiatan mereka memutuskan melakukan eksodus ke luar zona perdagangan maritim Selat Malaka, karena tidak ingin berinteraksi dengan pedagang Portugis yang merebut pusat perdagangan mereka. *Ketiga*, sejumlah besar pedagang Melayu meramaikan perdagangan di sejumlah bandar niaga yang berkembang di pesisir barat jazirah selatan pulau Sulawesi, antara lain pada bandar:

Tallo, Siang, Tanete, Bacokiki, Suppa, dan Napo. Terakhir, aktivitas pedagang dari Mandar dalam dunia perdagangan pada bandar-bandar niaga di pesisir barat jazirah selatan pulau Sulawesi. Jika sebelumnya mereka hanya mengunjungi Bandar Tallo, dalam perkembangan kemudian juga mengunjungi Kerajaan Gowa, karena ketika itu yang menjadi raja (sombaya) Kerajaan Gowa adalah Daeng Matanre Karaeng Manguntungi Tumaparisi Kallonna (1510-1546) yang berdarah Mandar (Napo).

Daeng Matanre Karaeng Manguntungi Tumaparisi Kallonna (lazim disebut saja Tumaparisi Kallonna) adalah putra dari perkawinan antara Raja Batara Gowa (raja Kerajaan Gowa yang ketujuh) dengan I Resasi, putri dari seorang pedagang dari Napo yang menetap dan berniaga di Kerajaan Tallo. Tampaknya semangat berniaga dari kakeknya bergelora dalam tubuh dan pikirannya, sehingga ia bergiat untuk mengubah orientasi politik kerajaan yang dipimpinnya itu dari orientasi agraris ke dunia maritim. Atas dukungan keluarga dari kakeknya, ia membangun Sombaopu untuk menggantikan kedudukan pusat pemerintahan terdahulu yang berada sekitar 6 (enam) kilometer dari pesisir, yaitu Tamalatea. Sombaopu terletak pada wilayah pesisir di bagian utara muara Sungai Jeneberang.

Keterlibatan dalam dunia perdagangan maritim itu dipandang oleh pihak Kerajaan Tallo sebagai langkah persaingan yang dapat memerosokkan kegiatan maritim Kerajaan Tallo. Oleh karena itu, atas dukungan sekutunya ; Kerajaan Marusu dan Kerajaan Polombangkeng, Raja Tallo, I Mangajowang Berang Karaeng Pasi (Raja Tallo ketiga)

melancarkan serangan terhadap Kerajaan Gowa. Serangan itu berhasil dipukul mundur oleh pasukan Kerajaan Gowa. Untuk tidak terjadi korban jiwa lagi, Raja Tallo mengundang Raja Gowa datang ke Tallo untuk melakukan perundingan penyelesaian konflik di antara mereka. Raja Tallo memberanikan diri mengundang Raja Gowa, karena raja itu mempersunting saudara perempuannya yang bernama I Reija Karaeng Lowe Baine.

Undangan itu diterima dan dipenuhi oleh pihak penguasa (raja dan pembesar kerajaan) untuk melakukan perundingan. Dalam perundingan yang berlangsung pada tahun 1528 itu diketahui bahwa pembentuk Kerajaan Tallo adalah Karaeng Lowe ri Sero, adik dari Raja Batara Gowa. Sehingga dengan perkawinan antara Raja Gowa dengan putri Kerajaan Tallo dipandang telah mempersatukan kembali kedua kerajaan ini. Dalam perundingan itu dicapai ikrar “barangsiapa yang mengadu-dombakan Gowa dan Tallo, ia akan dikutuk Dewata (*ia-iannamo tau ampasiewai Gowa-Tallo iamo nacalla Dewata*). Sejak itu dikenal ungkapan ‘satu rakyat, dua raja’ (*se’reji ata, rua karaeng*). Dalam perundingan itu juga disepakati untuk tidak menjadikan Kerajaan Marusu dan Polombangkeng sebagai kerajaan taklukan (*palili*), tetapi menempatkannya menjadi kerajaan sahabat.

Kerajaan Marusu, dalam perkembangannya, menjadi kerajaan sahabat terpenting, karena ditempatkan menjadi lumbung padi bagi kerajaan Gowa-Tallo yang lazim disebut Kerajaan Makassar. Persekutuan yang terbina itu mendasari keterlibatan Kerajaan Marusu, tidak hanya ikut memajukan perkembangan perdagangan maritim Kerajaan Makassar,

tetapi juga ikut memberikan dukungan dan bantuan dalam kegiatan memperluas pengaruh kekuasaan kerajaan kembar itu, yang akhirnya menghantarnya menjadi bandar niaga transito terpenting di nusantara pada periode paruh kedua abad ke 16, hingga awal paruh kedua abad ke 17 (sekitar 1565-1669).

Prinsip laut bebas (*mare liberium*) dan kebijakan perdagangan bebas (*free trade*) yang dianut oleh Kerajaan Makassar itu menimbulkan konflik dengan para pedagang Belanda yang terorganisasikan dalam Perkumpulan Dagang Hindia Timur (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*), disingkat VOC). Konflik yang berkepanjangan sejak VOC bergiat di Nusantara pada awal abad ke-17 itu akhirnya menghantar dua belah pihak terlibat dalam perang yang dahsyat yang dikenal dengan sebutan Perang Makassar (1666-1667, 1668-1669). Peristiwa itu berhasil diakhiri pada babakan pertama perang itu dengan menghasilkan perjanjian perdamaian yang disebut Perjanjian Bungaya pada 18 November 1667.

Perjanjian itu menetapkan bahwa Kerajaan Marusu dan Pangkajene yang ikut mendukung Kerajaan Makassar dalam perang itu dinyatakan sebagai wilayah kekuasaan langsung dari VOC. Wilayah ini diambil-alih karena merupakan daerah penghasil beras terbesar dan terbaik. Sementara kerajaan-kerajaan lain dinyatakan sebagai sekutu, antara lain; Kerajaan Gowa, Bone, Soppeng, Sidenreng, Wajo, Luwu, Tanete, Barru dan kerajaan-kerajaan di daerah Mandar (Putu Ulunna Salu dan Pitu Babana Binanga). Jadi berdasarkan perjanjian itu, kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan dibedakan antara: 1) *gouvernemen landen* atau daerah taklukan yang diperintah

langsung dan 2) *bondgenootshappelijke landen* atau kerajaan-kerajaan yang disebut sebagai kerajaan sekutu dalam kedudukan sebagai daerah protektorat pihak penguasa Belanda, karena harus mengakui pihak VOC sebagai pelindung dan perantara.

Ketika pemerintah Belanda mengambil-alih kedudukan VOC di Indonesia dan mulai giat menata pemerintahan setelah serah terima dengan pihak Inggris pada 1816, ketatanegaraan masih sama dengan periode VOC. Kecuali dalam perkembangan kemudian, dalam usaha untuk memudahkan perlawanan rakyat atau kerajaan, akhirnya pemerintah memiliki daerah kekuasaan langsung yang baru. Namun karena kekurangan tenaga pelaksana pemerintah, sehingga pelaksanaan pemerintahannya dipinjamkan kepada pemerintahan lokal. Wilayah itu dikategorikan sebagai 'kerajaan pinjaman' (*leen vorstendom*), antara lain; Kerajaan Tallo, Kerajaan Wajo dan Kerajaan Bone.

Memasuki abad ke-20, kebijakan pemerintah Hindia Belanda berubah, sebagai tanggapan atas semakin banyaknya negara-negara Eropah bergiat menemukan koloni. Hal itu mendorong pemerintah melaksanakan ekspedisi militer untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan yang berstatus serajaan sekutu dan kerajaan pinjaman. Kegiatan militer itu disebut 'ekspedisi militer Sulawesi Selatan 1905' (*Zuid-Celebes Expeditie 1905*). Setelah penaklukan, pemerintah menata organisasi pemerintahan secara umum terhadap semua wilayah kekuasaan, termasuk daerah-daerah yang sebelumnya telah berstatus *gouvernement landen*. Maros yang sebelumnya berstatus distrik dari wilayah yang disebut

'distrik-distrik Bagian Utara' (*Nooder Districten*) ditetapkan sebagai salah satu *onderafdeeling*.

Periode kedudukan Maros sebagai salah satu *onderafdeeling* inilah yang mendapat perhatian dari Simon Sirua Sarapang dalam penelitiannya yang kini menjadi sebuah buku yang ada di tangan pembaca. Penelitian yang dilakukan ini mengarahkan perhatian pada dinamika elite dalam masyarakat Maros, sehubungan usaha pemerintah menyelenggarakan sistem administrasi yang bercorak birokrasi. Kebijakan ini dimaksudkan agar sistem administrasi primordial yang selama ini berlangsung dapat direformasi. Dalam hal ini aparat pemerintah membutuhkan tenaga-tenaga yang berpendidikan untuk masuk dalam birokrasi pemerintahan dan meniadakan sistem kekerabatan kebangsawanan yang dianut oleh pola administrasi primordial.

Studi yang dilakukan ini cukup kritis, bukan karena menggunakan sumber-sumber arsip pemerintah kolonial dan koran-koran yang mengungkapkan kehidupan politik, sosial, dan budaya masyarakat Maros, tetapi yang terpenting adalah usaha mengungkapkan metode yang digunakan oleh kepala adat-kepala adat yang oleh peneliti dan penulis buku ini digunakan konsep *karaeng*, di Maros untuk mempertahankan kedudukan kekuasaan mereka dan kondisi pertarungan dalam merebut kedudukan kekuasaan antarelite lokal dalam sistem pemerintahan kolonial Belanda. Dalam menganalisis pertarungan elite itu, penulis juga menggunakan sejumlah teori yang dikembangkan oleh para politisi dan sosiolog sehingga menarik untuk dibaca.

Karya ini tidak hanya memperkaya pengetahuan kita

tentang sejarah lokal Sulawesi Selatan, tetapi juga membuka cakrawala berpikir kita tentang perilaku elite lokal, atau yang sering juga disebut para elite tradisional yang cenderung mempertimbangkan kedudukan sosial secara kultural, dan kurang atau lamban mengikuti perkembangan yang sedang berlangsung.

Buku ini juga memberikan gambaran yang menarik tentang perubahan yang terjadi dengan penataan sistem pemerintahan yang bercorak birokrasi yang berdampak pada perubahan perilaku para pemegang kendali kekuasaan politik dan kultural di Maros. Penerapan sistem administrasi yang baru ini pada gilirannya juga mendorong pihak pemerintah Hindia Belanda menerapkan status kebangsawanan baru dari mereka yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Pendidikan Bagi Pegawai Bumiputera (*Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren* disingkat OSVIA) dengan gelar "Andi". Selanjutnya menganjurkan kepada mereka untuk menyapa para bangsawan tinggi kerajaan dengan gelar baru itu (andi). Gelar baru ini dapat disetarakan dengan gelar tradisioal sebelumnya, seperti I, La, We, Bau, atau Daeng). Hal ini dimaksudkan untuk menyetarakan kedudukan bangsawan baru ciptaan pemerintah kolonial Belanda, bagi mereka yang berpendidikan OSVIA, dengan bangsawan tradisional. Karena dalam masyarakat ini, berlaku tatanan budaya yang tidak boleh dilakukan oleh mereka yang berstrata rendah, melaksanakan kekuasaan kepada mereka yang berstrata tinggi.

Selamat membaca buku ini yang mengungkapkan kondisi masyarakat Maros pada periode 1900-1946, periode

pelaksanaan pemerintahan kolonial secara menyeluruh di Sulawesi Selatan, dengan fokus perhatian pada dinamika politik kelompok elite lokal. Oleh karena itu, buku ini dapat dipandang sebagai kajian sejarah politik lokal, khususnya pada Ondaafdeeling Maros. Kajian ini dapat membuka cakrawala berpikir kita untuk menelusuri studi sejenis pada daerah atau kerajaan lain yang mengalami keadaan sejenis pada pemerintahan kolonial Belanda.

Tamalanrea, Januari 2016

Dr. Edward L. Poelinggomang



DAFTAR ISI

Pengantar Penerbit	v
Pengantar Penulis	vii
Pengantar Editor	ix
Daftar Isi	xvii

Bab I

Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	2
B. Beberapa Penelitian Terdahulu yang Relevan	15

Bab II

Dinamika Elite dan Intervensi Asing	23
A. Dikepung Kekuatan Luar	24
B. Perebutan Sumberdaya: Alokasi dan Otorisasi Kekuasaan	30
C. Masyarakat Adat dan Pembentukan Birokrasi Modern	36
D. Penataan Struktur Kelembagaan: Integrasi dan Perubahan	54

Bab III

Warisan Adat dan Politik Representasi Karaeng	67
--	----

A. Pola Penguasaan dan Kepemilikan Tanah	68
B. Galung Arajang dan Kontestasi Kekuasaan	74
C. Krisis Ekonomi dan Politik dan Upaya Pemecahannya	79

Bab IV

Kesimpulan	95
-------------------------	-----------

Daftar Pustaka	103
-----------------------------	------------

Tentang Penulis	109
------------------------------	------------



Bab I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Pada hari Selasa, 27 April 1900 A. J. Muller, seorang Pengawas Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Belanda yang ditugaskan di Maros, tewas mengenaskan dengan luka menganga di sekujur tubuhnya. Peristiwa yang terjadi sekitar 4 km dari Camba tersebut disebabkan oleh ulah Tuan Muller yang dengan nada kasar mengusir sekelompok pemuda yang sedang berteduh di sebuah *baruga* yang khusus disediakan bagi para pelancong untuk beristirahat.¹ Menurut *De Makassar Courant* yang terbit dua hari setelah kejadian itu, bahwa polisi berhasil menangkap dua pelaku lewat bantuan seorang bangsawan Bone yang tinggal di Camba, yakni Arung Labuaja Andi Calla.²

Namun, masih ada seorang pelaku yang masih buron yang menurut informasi intelijen, melarikan diri ke Mare, Bone. Operasi pengejaran dilakukan dan pada awal bulan

¹ PNRI, "De moord op den Heer Muller" dalam *De Locomotief*, 4 Mei 1900, lembar ke-2.

² PNRI, "Moordzaak opzichter Muller te Maros" dalam *De Locomotief*, 7 September 1900, lembar ke-2.

Mei penangkapan terhadap sejumlah warga yang diduga berada di belakang aksi kekerasan tersebut digelar. Seorang Kepala Kampung dan enam orang pengikutnya dari Camba diinterogasi dan diadili sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.³

Perampokan, pencurian, pembunuhan dan pemerkosaan merupakan empat kasus kriminal yang silih berganti terjadi di Maros di awal abad ke-20. Motif bagi tindakan perampokan dan pencurian sangat jelas karena persoalan kemiskinan yang tidak segera dapat diatasi oleh para penguasa lokal yang pada akhirnya berdampak pula pada ketidakpuasan politik yang makin luas. Pada Juli 1900, seperti yang diwartakan oleh media *De Makassar* bahwa perampokan terhadap pedagang beras di daerah Koeri terjadi di depan kepala kampung. Pejabat ini seperti tak kuasa menahannya. Pemerintah Belanda menuduh, bahwa karena kemiskinannya sang kepala kampung berada dibalik aksi itu.⁴

Keresahan akibat tindakan kriminal tersebut makin luas dan rakyat yang didukung para bangsawan meresponnya dengan melakukan aksi protes terhadap Asisten Residen Maros yang dipandang tidak mampu menciptakan keamanan dan ketertiban. Pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 1900 suatu perlawanan terhadap aparat pemerintah Belanda berkobar namun, dapat dipadamkan dengan cepat oleh Asisten Residen.⁵ Perlawanan ini menunjukkan betapa

³ PNRI, "Moordzaak opzichter Muller ... 7 September 1900.

⁴ PNRI, "Het opstootjes te Maros" dalam *De Locomotief*, tanggal 21 November 1900, lembar ke-2.

⁵ PNRI, "Een opstootjes" dalam *De Locomotief*, " , 13 November 1900, lembar ke-2.

potensi konflik dari mereka yang termarginalkan secara ekonomi dan politik, menyimpan bara konflik yang sesekali dapat meletup, menggoyahkan tatanan sosial dan struktur pemerintahan yang ada.

Dalam Harian *Soerabajasch Handelsblad* yang terbit pada 14 Juni 1902 diberitakan bahwa penduduk Maros di akhir tahun 1901 hingga pertengahan 1902, dilanda kelaparan yang menyedihkan. Hal tersebut disebabkan oleh panen yang gagal, areal persawahan kering kerontang. Musim kemarau yang panjang dan sistem irigasi yang buruk, dan hama tanaman yang menyerang mengakibatkan hidup mereka berada diambang kematian.⁶ Laporan H. van Kol dengan judul “De dreigende voiding schaarschte te Maros” (Kelangkaan Pangan yang Mengancam di Maros) menggambarkan bahwa “di sepanjang jalan-jalan utama Maros yang tampak hanyalah kekeringan dan hanya pohon-pohon liar yang seakan enggan hidup”.⁷

Selanjutnya, H. van Kol yang menuliskan hasil observasinya tersebut di Makassar pada 22 Mei 1902 menuturkan; “rumah-rumah telah roboh dan terabaikan, ditinggal pergi oleh pemiliknya karena wabah kolera dan cacar yang menggerogoti. Hanya rumah para kaum bangsawan yang tampak hidup. Beberapa orang pria berjalan dengan langkah gontai, menyampirkan sarung di pundaknya, yang lain mengikatkannya pada pinggul sebagai bentuk hormat. Kebanyakan dari mereka adalah

⁶ PNRI, H.van Kol *Soerabajasch Handelsblad*, tanggal 14 Juni 1902, lembar ke-2; PNRI, “Ziekten” dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, tanggal 7 Desember 1904, lembar ke-2.

⁷ H.van Kol, *Soerabajasch Handelsblad*, tanggal 14 Juni 1902, lembar ke-2.

orang-orang Bugis, mengenakan ikat pinggang dengan keris dan hampir semuanya memegang tombak di tangan”.⁸ Atas kondisi kemelaratan yang menimpa Maros, van Kol di akhir laporannya mempersalahkan kebijakan pemerintah kolonial yang “tidak bertanggungjawab, kurang perhatian dan ceroboh dengan tidak berbuat apa-apa di bidang irigasi bagi daerah-daerah di luar Pulau Jawa”.⁹

Ironi kehidupan yang ditampilkan van Kol persis seperti yang terbaca dari deskripsi singkat yang disajikan para pelancong yang melawat ke Bantimurung di tahun yang sama (1902). Para bangsawan Maros, demikian kesaksian van Kol, hidup layak dengan limpahan padi yang memenuhi *kalampang* (lumbungnya) yang dijaga ketat oleh para *jannang*, ternak yang mengelilingi rumah, putri-putri mereka dengan pakaian yang mewah, seperti memberi kesan bahwa kesulitan hidup tidak menghampiri mereka, dan tidak terlalu resah dengan angka kriminalitas yang makin tinggi”.¹⁰

Polarisasi dan perbedaan dalam pemenuhan aneka kebutuhan hidup tampaknya sangat dipengaruhi oleh kemampuan para penguasa lokal yang tak lain adalah kepala masyarakat adat (kepala distrik) atau regent yang umumnya dijabat oleh bangsawan tinggi dengan sapaan karaeng. Mereka pintar memainkan peran sebagai penagih dan pengumpul pajak, antara lain pajak kepala (bahasa Makassar; *sima asaparang atuwong*) yang sukses.

⁸ H.van Kol, *Soerabajasch Handelsblad*, tanggal 14 Juni 1902, lembar ke-2.

⁹ H.van Kol, *Soerabajasch Handelsblad*, tanggal... 14 Juni 1902.

¹⁰ Kolonial Verslag, *Celebes en Onderhoorigheden* (1902: 56).

Bentuk lembaga hadat Maros yang longgar memungkinkan para anggotanya mengembangkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan wilayahnya. Perubahan terjadi di tahun 1903. Setiap kesatuan masyarakat adat mulai merasakan hasil yang menguntungkan dari keberhasilan mereka mengolah sawah. Dengan curah hujan yang cukup dan perbaikan sistem irigasi yang memadai, terjadi peningkatan hasil pertanian dan perdagangan lokal.¹¹ Hal ini didukung oleh semangat persaudaraan yang dipertunjukkan oleh para pemimpin masyarakat adat untuk menghargai pluralitas.

Pada 1904, Galarang Tangkuru meninggal dunia. Galarang ini dikenal oleh Pemerintah Belanda sebagai sosok yang tidak bisa diajak bekerjasama, terutama untuk melaksanakan program-program pemerintah. Ketika ia meninggal, Belanda kemudian mendorong Kepala Distrik Lau untuk menganeksasi wilayah Tangkuru. Di sinilah eskalasi kekerasan lewat agitasi pemimpin Distrik Lau membunyah.

Pada 1908, Sulewatang Raya meninggal dalam perjalanannya ke Mekkah dan kemudian oleh pemerintah Belanda wilayah ini digabungkan ke dalam Distrik Lau. Oleh wakil rakyat Maros yang duduk dalam Dewan Zuid Celebes diajukan usul agar membagi kembali wilayah hadat Maros seperti dahulu. Namun usulan itu ditolak oleh pemerintah Belanda¹².

¹¹ Kolonial Verslag, *Celebes en Onderhoorigheden* (1904: 91).

¹² Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, W.G. van Der Wolk, "Kort Apercu Betreffende de Onderafdeling Maros" dalam *Memorie van Overgave W.G. der Wolk, Controleur van Maros, 1946-1947*. Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Margariet M. Lappia, (Makassar: Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2006: 134).

Penolakan itu didasarkan pada fakta bahwa para pemimpin hadat Maros sering berselisih satu sama lain untuk saling berebut pengaruh dan hal itu dapat mengancam eksistensi pemerintah Belanda. Salah satu jalan yang ditempuh adalah menggabungkan sejumlah distrik ke dalam tiga kelompok besar (federasi). "Integrasi ini dengan sendirinya dapat meredam keresahan politik yang terjadi terutama untuk mencari solusi atas perselisihan Lebbotengae dan Galarang Appaka dengan Toddo Lima".¹³

Sementara itu, kondisi di wilayah pegunungan di tahun 1909-1930 tampaknya juga terjadi keresahan yang menimpa para karaeng dalam merespon dinamika politik yang terjadi di wilayah dataran. Kelompok yang cukup berpengaruh seperti dari Lebbotengae (Cenrana dan Camba), yaitu mantan Arung Saharu atau Sawaru (Cenrana) yang bersama keluarga dan pengikutnya dapat memperoleh senjata dan logistik yang memadai sebagai persiapan untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Dengan kegigihannya mereka melakukan teror dan berhasil mendapatkan dukungan masyarakat.

Namun, dukungan pada tingkat bawah itu justru menjadi ancaman bagi para karaeng di wilayah dataran yang menduga bahwa simpati atas gerakan itu juga bisa diberikan oleh masyarakatnya. Semenjak tahun 1930 hingga akhir tahun 1946 terjadi polarisasi dan kontestasi antarelite dalam merespon gerakan perlawanan yang muncul pada tahun-tahun pertama di awal abad ke-20, baik oleh tokoh muda

¹³ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, W.G. van Der Wolk, "Kort Apercu Betreffende ..." (2006: 136).

maupun sekelompok bangsawan yang berpikir progresif. Percaturan politik dalam kancah federasi makin menambah keruwetan sikap para karaeng untuk menentukan pilihan secara tepat, formula “negara” yang bagaimana yang cocok bagi eksistensi kekuasaannya dalam menatap masa depan wilayah kekaraengannya.

Dalam konteks persaingan antarelite untuk menguasai berbagai sumberdaya, para penguasa lokal yang lazim disapa “karaeng” tersebut berusaha menciptakan kesejahteraan sosial melalui berbagai kebijakan, seperti perbaikan infrastruktur perhubungan, penyediaan sarana pendidikan, pertanian, dan hasilnya pertama-tama digunakan untuk membangun dan memperkuat struktur kekuasaan sehingga menimbulkan ketidakpuasan yang meluas.

“Mengapa para karaeng di Maros dapat bertahan dan elite terfragmentasi dalam kelompok, bersekutu dan berseteru untuk menguasai sumber daya yang berdampak pada terjadinya integrasi dan perubahan? Permasalahan ini dapat dikembangkan lagi dalam beberapa pertanyaan penelitian. Bagaimana para ketua masyarakat adat dapat mempertahankan kekuasaannya ketika diterpa ancaman dan tantangan dari kekuatan internal dan eksternal? Bagaimana dinamika itu berjalan di tengah pertarungan antarelite untuk mengintegrasikan kepentingan berbagai kelompok yang berbeda dalam kehidupan berbangsa? Semuanya akan terjawab dalam buku ini.

Adapun istilah “karaeng” penulis gunakan untuk menyebutkan mereka yang memegang jabatan sebagai kepala

distrik atau regen. Demikianlah, misalnya Karaeng Marusu atau Karaeng Turikale maka yang dimaksud adalah Kepala Distrik atau Regen Marusu atau Turikale.

Kajian ini dimulai dari tahun 1900 ketika para karaeng di Maros mulai kehilangan kontrol terhadap bidang politik dan ekonomi sebagai akibat penetrasi kekuasaan pemerintah kolonial Belanda melalui beberapa cara, antara lain dengan membatasi kewenangan para karaeng dalam mengelola pajak. Sedang pembatasan temporal hingga tahun 1946 dipilih dengan beberapa pertimbangan: a). Pertarungan antarelite mendapatkan momentum baru dalam semangat kemerdekaan yang mengubah tatanan perilaku para karaeng dalam hembusan demokratisasi. Dekade ini menjadi awal perjuangan bagi para elite terpelajar untuk memperjuangkan berubahnya sistem birokrasi tradisional ke arah modern. b). daerah yang baru “terbentuk” ini memiliki kewenangan yang dibatasi untuk mengatur dan mengelola dirinya. Artinya otoritas penguasa dalam mengembangkan agenda dan program bahkan tanggapannya atas pembangunan perlu merujuk pada penguasa di atasnya, dan otoritas yang lebih tinggi wajib memantau pencapaiannya. Sementara sebelumnya, bangsawan yang berkuasa lebih menunjukkan adanya kewenangan dalam membuat kebijakan dan peraturan bagi rakyatnya, serta merancang dan menetapkan agenda pembangunannya. c). berkurangnya hak-hak prerogatif para karaeng dan dewan hadat serta rasionalisasi struktur kelembagaan pemerintahan daerah yang membawa pengaruh pada makin mengecilnya legitimasi para bangsawan.

Buku ini diarahkan untuk mengembangkan kajian sejarah politik lokal dengan fokus pada dinamika dan kontestasi politik antarelite. Pendekatan yang lebih “berorientasi ke dalam” (*more endogenously oriented*) ini memperlihatkan karakteristik yang amat variatif, antara sekutu dan seteru, integrasi dan perubahan. Dalam proses integrasi terjadi pertarungan (kontestasi) kepentingan antarelite yang berakibat pada munculnya ketidakharmonisan hubungan antarelite dan antarrakyat sehingga terjadi transformasi politik dan sosial. Kontinuitas dan perubahan yang terjadi tak akan bisa dimengerti apabila sejarah dalam ruang yang kecil ini (Maros) dan tempat yang dekat dengan pusaran politik regional (Makassar) ini tidak dimunculkan melalui wacana akademik. Tujuan akademik ini berhubungan dengan tujuan kedua, yang secara praktis dimaksudkan untuk memberikan model bagaimana kecenderungan dan orientasi kajian sejarah politik lokal dapat merangsang lahirnya kajian baru dengan pendekatan yang berbeda, di tempat dan waktu yang berlainan.

Sistem kekaraengan di Maros merupakan lembaga pemerintahan yang dibangun berdasarkan kepentingan bersama, memperlihatkan beberapa aspek yang mencirikan sebagai sebuah negara.

Pertama, para karaeng ini didukung oleh struktur organisasi yang masing-masing mempunyai peranan tertentu dalam kelompok.

Kedua, para karaeng sebagai kepala masyarakat adat mempunyai kewenangan memaksa untuk berlakunya sebuah aturan atau kebijakan tertentu dalam mengelola wilayahnya.

Untuk memaksakan keputusannya, karaeng menggunakan “pejabat-pejabat militer” yang sangat bergantung kepada loyalitas rakyatnya dan dukungan para pejabat pemerintah Belanda seperti kontrolir sebagai kepala *onderafdeeling*.

Ketiga, karaeng menjalankan kekuasaannya atas rakyat dan wilayah dan mempunyai hak mutlak untuk membuat keputusan-keputusan akhir yang mengikat.

Keempat, lembaga-lembaga adat bekerja sesuai batas kewenangan yang dimilikinya yang diatur secara jelas. Lembaga-lembaga tersebut secara struktural merupakan sebuah struktur yang terbentuk oleh sejumlah komponen yang satu sama lain saling berhubungan.

Dalam kajian sejarah politik, struktur menunjuk pada hubungan di antara individu yang dipersonalisasi oleh karaeng sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan pola hubungan yang dibangun dengan aparatur pembantu di tingkat bawah. Dari sejumlah komponen struktur, pemerintah merupakan struktur politik kongkret yang paling penting. Pemerintah sebagai penyelenggara negara, mempunyai hak monopoli untuk mendorong berfungsinya sebuah kekuasaan. Struktur yang tidak dapat dipisahkan secara fisik adalah struktur analitis yang digunakan secara luas, terutama untuk menjelaskan peran masyarakat adat atau individu dalam sistem kekarajaan.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa analisis struktural berkaitan dengan hubungan di antara sejumlah bagian dan interaksi antara bagian. Komponen struktural seperti sistem, keseimbangan peran antarlembaga tradisional

dalam pemerintah, dan integrasi antarsistem, terutama setelah penetrasi asing, merupakan konsep yang sulit dihubungkan dengan indikator empiris yang spesifik, seperti faktor-faktor yang berubah pada masyarakat adat. Kesulitannya, bagaimana mengetahui kapan masyarakat Maros telah menciptakan suatu “keseimbangan” yang tepat antara integrasi dan diferensiasi struktural yang akan menghasilkan perubahan politik dan sosial? Pertanyaan semacam ini menjadi sebuah masalah yang tidak mudah dijawab, seperti yang pernah dikeluhkan oleh seorang ahli sejarah politik, Charles F. Andrain (1992).¹⁴

Dari perspektif sejarah struktural, buku ini mencoba menjelaskan hubungan di antara struktur-struktur sosial yang berbeda, memperlihatkan kegiatan yang dilakukan oleh struktur, memahami dampak kebijakan pemerintah kolonial dalam mendinamisir distribusi kekuasaan. Struktur tindakan dan perilaku berjalan dalam waktu dan saling berkaitan secara dinamis, maka Archer membuat fase-fase perkembangannya sebagai “kondisi struktural”, “interaksi struktural”, dan “perluasan struktural” yang merupakan lingkaran tanpa akhir.¹⁵ Kondisi struktural menggambarkan keadaan tertentu yang memungkinkan dan yang tak memungkinkan dilakukannya tindakan. Interaksi struktural merupakan tindakan yang disengaja, dalam arti mempunyai makna historis, dan

¹⁴ Charles F. Andrain. *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1992). Diterjemahkan dari *Political Life and Social Change* oleh Luqman Hakim.

¹⁵ Piör Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*. (Jakarta: Prenada, 2007: 266). Diterjemahkan dari *The Sociology of Social Change* (1993) oleh Alimandan.

perluasan struktural adalah akibat tindakan yang diharapkan yang berubah menjadi obyektif dan yang merupakan tindakan dan pikiran yang tak dapat diubah.¹⁶

Dalam struktur sosial dan politik sebuah entitas politik yang bernama masyarakat adat, kerajaan atau negara, perjuangan dan pertarungan akan melahirkan wewenang (*authority*) dan legitimasi (*legitimacy*). Karaeng mempunyai kemampuan membuat rakyat melakukan sesuatu dengan dasar hukum atau mandat yang diperoleh dari rakyat dan pemerintah Belanda. Kekuasaan akan berjalan efektif apabila karaeng dan para pembantunya, elite-elite politik di luar struktur adat saling berhubungan.

Para elite tradisional mempunyai peran dalam arus kontinuitas tindakan dan peristiwa. Persekutuan dan perseteruan akan terus berjalan hingga tujuan tercapai dan berhenti pada saat mereka menyadari dan merasakan akibat perseteruan itu. Mereka yang tersingkirkan karena perseteruan akan mengalami perpecahan dan berusaha memperbaikinya kembali melalui kepaduan integrasi. Hampir semua persaingan (kontestasi) yang muncul berujung pada cita-cita yang sama, menegakkan kekuasaan, membangun demokrasi dan membebaskan intervensi asing dalam mengelola kepentingan domestik. Struktur menelikung masuk dalam instrumen hukum yang termanifestasi dalam bentuknya yang konkret berupa perangkat aturan seperti ikrar kesetiaan, kontrak politik dan sejenisnya. Struktur bisa tampil

¹⁶ Piör Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*. (2007: 266).

dalam konstruksi negara berupa aparaturnya penyelenggara pemerintahan adat, seperti lembaga hadat; pranata politik seperti partai-partai, organisasi-organisasi perjuangan yang dengan sarana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan.

Konteks analisis kekuasaan dalam kajian ini terletak pada realitas sosialnya bahwa persaingan antarelite juga menyebabkan terjadinya perubahan dan perkembangan. Dari perspektif kekuasaan perubahan terletak pada otoritas dan legitimasi penguasa dan pembantunya untuk mengambil sanksi terhadap pengingkaran dari setiap instruksi yang diberikan. Perlawanan terhadap perintah karaeng (raja) untuk membayar pajak dan cacah jiwa serta kerja wajib (seperti membuka, memperbaiki, merawat bendungan, parit dan saluran air)¹⁷ dan kerja paksa, pengabaian perintah untuk mobilisasi tenaga kerja dan ekonomi pada masa itu akan berimplikasi pada terjadinya perubahan politik dan sosial. Perubahan politik adalah perubahan pranata institusi politik untuk menciptakan suatu tatanan baru sistem pemerintahan yang berbasis pada kepentingan kekuasaan, sedang perubahan sosial adalah perubahan struktur pada berbagai lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial masyarakat, termasuk nilai-

¹⁷ Yang dimaksud dengan kerja wajib, yang harus dikerjakan oleh penduduk Sulawesi menurut Lembaran Negara 1868 Nomor 16 dan 1891 Nomor 113, yang diperbaharui dengan Lembaran Negara Nomor 55 tahun 1900 adalah membuka, memperbaiki, merawat bendungan, parit dan saluran air". Dalam Lembaran Negara (No. 55/1900) tersebut disebutkan pula bahwa peraturan kerja wajib di setiap wilayah harus diubah dalam waktu 5 tahun, "dengan tujuan untuk melakukan pengurangan secara bertahap sesuai dengan kepentingan umum". Selanjutnya lihat; PNRI, "De regeling der heerendiensten in Zuid Celebes" dalam *Soerabaja Handelsblad*, tanggal 7 Oktober 1905, lembar ke-2.

nilai, sikap, pola, perilaku dan simbol-simbol.¹⁸

B. Beberapa Penelitian Terdahulu yang Relevan

Rujukan yang dapat memberi petunjuk awal tentang Maros pada awal abad ke-20 adalah sebuah laporan serah terima jabatan (*Memorie van Overgave, MvO*) dari seorang pejabat yang ditugaskan di Onderafdeeling Maros atau yang lebih umum dikenal sebagai wilayah “Distrik Utara” (*Noorder Districten*) yaitu Controleur W.C. van Der Meulen tahun 1910.¹⁹ Laporan ini menyajikan hal-hal yang menarik dari sudut pandang seorang pejabat pemerintah Belanda tentang wilayah, penduduk, adat-istiadat, kebiasaan warga, administrasi pemerintahan, lingkungan alam, observasi dan prediksi tentang apa yang diduga akan terjadi.

Enam belas tahun setelah Van der Meulen menuliskan *MvO* tersebut kemudian muncul laporan sejenis dari Controleur A.S.L. Spoor tahun 1926²⁰. Dua puluh satu tahun setelah itu lahir pula laporan dari W.G. van der Wolk yang dibuatnya selama ia menjabat sebagai kontrolir dari tahun 1946 hingga 1947.²¹ Meskipun periode kepemimpinan W.G.

¹⁸ David L. Sills, (ed). *International Encyclopedia of the Social Sciences*. (The Macmillan Company and The Free Press, New York, Collier-Macmillan Publisher, London. Volume 14, 1972: 366).

¹⁹ ANRI, W.C. van der Meulen “Nota van Overgave der Afdeeling Noorderdistricten op 24 Juni 1910”, *Reel no. 32, MvO serie 1e*.

²⁰ ANRI, A.S.L. Spoor. *Memorie van Overgave van de Controleur Onderafdeeling Maros*, 16 Maret 1926, reel no. 32, serie 1e.

²¹ W.G. van Der Wolk, “Kort Apercu Betreffende de Onderafdeling Maros” dalam *Memorie van Overgave W.G. der Wolk*, Controleur van Maros, 1946-1947. Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Margariet M. Lappia, (Makassar: Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2006).

van Der Wolk agak singkat (kurang lebih satu tahun) namun gambarannya tentang Maros cukup komprehensif.

Mungkin saja terdapat laporan yang sama dari periode antara ketiga pejabat ini mengingat jarak waktu yang cukup panjang (11 tahun) antara tahun 1910 (saat van der Meulen mengakhiri masa tugasnya) hingga tahun 1926 (ketika A.S.L. Spoor berhenti), dan dua puluh satu tahun kemudian (1926-1947) baru muncul laporan van der Wolk. Namun, selama menelaah bahan-bahan arsip Makassar (arsip-arsip tentang Maros dan sekitarnya menjadi bagian dari bundel arsip ini) yang menjadi koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta, penulis tidak menemukannya. Mengingat *MvO* tersebut merupakan sumber primer, maka diperlukan upaya dan kerja keras untuk menemukannya, sehingga kekosongan dari periode itu dapat diatasi. Dapat saja digunakan sumber lain seperti surat kabar dan *besluit* untuk saling melengkapi satu sama lain.

Sebagai sebuah laporan yang akan disampaikan kepada pejabat baru yang menggantikannya, van der Meulen, Spoor dan Wolk berhasil mendeskripsikan gambaran nyata masyarakat dengan berbagai kondisi dan tingkatannya, dan sekaligus rencana dan program selama ia bertugas, termasuk yang sudah dan yang belum dikerjakannya. Laporan seperti ini akan menjadi bahan rujukan dan refleksi bagi pejabat baru untuk menyusun rencana kerja selama ia ditempatkan di daerah tersebut.

Baik van der Meulen, Spoor maupun Wolk memang tidak memusatkan perhatiannya pada satu bagian saja dari

keseluruhan elemen yang diceritakan tetapi mereka juga membuat analisis singkat mengenai kegagalan rencana kerja pemerintah Hindia Belanda di daerah pendudukan. Sebab-sebab dari kegagalan tersebut seringkali diarahkan pada dimensi moral, mentalitas dan etika penduduk lokal yang dinyatakan sebagai “sukar diatur, tidak patuh pada hukum, dan tidak senang pada keteraturan sosial”. Dengan begini, demikian Meulen, Spoor dan Wolk, yang mendorong kaum bumiputera suka membuat keonaran dengan melakukan perampokan, pencurian, pembunuhan dan pemerkosaan”.

Kesimpulan ini harus dijelaskan dari perspektif lain yang kurang diminati oleh pejabat pemerintah Hindia Belanda manapun, yaitu bahwa penduduk sudah jenuh akan praktik-praktik kolonial yang hanya mementingkan eksploitasi daripada investasi untuk kesejahteraan warga jajahan. Peneliti mencoba menyoroti hal ini, terutama dalam konteks intervensi pemerintah Hindia Belanda dalam urusan internal masyarakat adat dan posisi para karaeng dalam konstelasi politik lokal di Onderafdeeling Maros.

Di samping itu ketiga kontrolir ini juga kurang memperhatikan dinamika internal di berbagai distrik di Maros bahwa terjadi resistensi yang sangat kuat terhadap dominasi pemerintah Hindia Belanda. Sudut pandang yang perlu dikoreksi dari laporan mereka, selain yang sudah disebutkan di atas, adalah penyelidikan sejarah Maros yang dilihat dari perspektif kolonial yang sedang berupaya memperluas imperiumnya di Sulawesi Selatan. Meskipun

demikian laporan ini memberi sumbangan bagi upaya penulisan sejarah Maros lebih lanjut. Bertolak dari tulisan tersebut penulis bermaksud mengisi kealpaan dari beberapa bagian yang kurang disoroti van der Meulen, Spoor dan Wolk sehingga sejarah Maros dapat dilihat secara lebih luas.

Edward L. Poelinggomang yang merupakan salah seorang sejarawan terkemuka Sulawesi Selatan memberi gambaran cukup jelas mengenai dinamika politik dan hubungan kekuasaan di kawasan ini. Meskipun ia memusatkan perhatiannya pada wilayah Makassar pada periode 1906-1942²², ketika pemerintah Hindia Belanda mulai melakukan penetrasi kekuasaan lewat serangkaian tindakan militer di awal abad ke-20, namun studi ini memberi petunjuk bahwa Onderafdeeling Maros yang menjadi bagian dari Afdeeling Makassar, berada dalam titik penting dalam penerapan strategi ofensif pemerintah kolonial. Dengan posisinya di tengah sebagai penghubung antardaerah, antara Makassar sebagai pusat pengendalian pemerintahan dengan, misalnya Pangkep, Barru, Parepare, Sidrap, Soppeng, Bone, dan Wajo, Maros menjadi episentrum kekuatan untuk merebut dan menguasai daerah-daerah tersebut. Edward L. Poelinggomang memperlihatkan bahwa pemerintah Hindia Belanda menempatkan kekuasaan sebagai pilar utama untuk menciptakan kehidupan politik, menunjukkan pertentangan (*conflict*) dan keterpaduan (*integration*).

Sumbangan penting dari studi Edward, L.

²² Lihat Edward L. Poelinggomang. *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan. Makassar, 1906-1942*. (Jogjakarta: Ombak, 2004).

Poelinggomang adalah mampu memperlihatkan dinamika politik yang terjadi antara Gowa dengan Bone dalam memperebutkan Maros, dan rebutan pengaruh antarpara bangsawan dalam menguasai bahkan “memelihara dan mengelola” konflik antarpenguasa lokal. Peneliti berusaha mengembangkan dan membuat analisis yang lebih spesifik dengan menampilkan peran para karaeng dari sejumlah masyarakat adat di Onderafdeeling Maros dalam pertarungannya untuk menguasai berbagai sumberdaya. Hegemoni kekuasaan itu makin kuat ketika para ketua masyarakat adat mengesampingkan ketokohan seorang karaeng untuk dipilih sebagai Ketua Dewan Hadat Maros, dan lebih mempercayakan hal itu kepada orang Eropa.

Bahan-bahan kajian yang digunakan dalam penulisan buku ini terdiri dari beberapa jenis sumber yang diperoleh dari berbagai tempat. Sumber-sumber arsip cukup tersedia dibandingkan sumber jenis lain dari periode sezaman sehingga memungkinkan penulis untuk menggunakannya dalam jumlah yang memadai. Arsip-arsip ini mudah diperoleh baik di ANRI Jakarta maupun di Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Sulawesi Selatan di Makassar (khusus periode NIT). Meskipun begitu kritik terhadap sumber arsip perlu dilakukan untuk menghindari ketimpangan yang muncul. Sumber-sumber arsip antara lain *Memorie van Overgave (MvO)*. Sumber arsip yang disimpan dalam bentuk microfilm ini dimaksudkan untuk memberi informasi kepada pejabat yang akan menggantikannya tentang apa yang sudah dan yang belum selesai dilaksanakan. Khusus tentang Maros,

termasuk sebagian pemberitaan menyangkut Pangkajene dan Sigeri, terdapat dalam roll Nomor 32 serie 1e.

Sumber acuan lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah *missive* (surat-surat resmi) terutama yang berasal dari pejabat pemerintah Belanda kepada atasannya yang lebih tinggi atau kepada bawahannya tentang suatu hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, pemerintahan, administrasi dan hukum. Peneliti tidak menemukan adanya surat-surat resmi dari pejabat lokal (kepala masyarakat adat/karaeng) kepada pemerintah Belanda kecuali beberapa informasi kecil yang berkaitan dengan penyampaian, permintaan atau harapan yang kemudian disampaikan kembali atau disinggung dalam jawaban atau amar putusan.

Bahan arsip selanjutnya adalah surat keputusan (*besluit*) dan laporan politik pemerintah Hindia Belanda yang tertuang dalam *Politiek Verslag van Timor en Onderhoorigheden*. Laporan politik (*Politiek Verslag*) dan laporan kolonial (*Kolonial Verslag*) yang disusun secara periodik antara tahun 1907-1915, dan surat kabar yang terbit secara rutin antara tahun 1900-1931 yang kini menjadi koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Jakarta. *PV* dan *KV* merupakan sumber primer yang dibuat secara rutin oleh pejabat untuk melaporkan perkembangan keadaan politik suatu wilayah kepada atasannya; Gubernur Sulawesi dan Daerah Bawahannya, Direktur Pemerintahan Dalam Negeri, dan Gubernur Jenderal.

Sumber primer pun harus diklasifikasi, ditelaah, dan dikritik berdasarkan asal sumber, isi dan relevansinya dengan obyek kajian. Dengan demikian mekanisme

“mencari dan mengumpulkannya” harus dilakukan dengan cara menggabungkan penelitian arsip, perpustakaan dan riset lapangan. Dengan cara ini “mengetahui bagaimana mengetahui sejarah” dan upaya eksplanasinya pun harus dapat menghubungkan kausalitas antarperistiwa, antarpelaku bahkan dari *locus* yang terpisah sekalipun.

Namun, masalah yang dihadapi adalah “kondisi” arsip yang berusia tua dan kerusakan fisik yang mengganggu pembacaan sumber. Sumber primer tidaklah cukup untuk mengisi semua ruang analisis dari beberapa aspek yang dibahas, karena itu diperlukan bantuan dari jenis bahan yang lain, yaitu sumber sekunder. Seperti halnya sumber primer sumber sekunder pun harus diklasifikasi, ditelaah, dan dikritik berdasarkan asal sumber, isi dan relevansinya terhadap obyek kajian.

Sumber lisan juga digunakan untuk mendapatkan kesaksian lain yang sifatnya bukan faktual. Keterangan lisan nanti akan diperoleh melalui wawancara dengan para saksi sejarah yang mengalami peristiwa dalam kurun waktu antara tahun 1945-1946. Keterangan dari mereka akan bermanfaat untuk melihat sisi lain dari suatu peristiwa, untuk mendengar kisah bagaimana mereka mengalaminya, memandang dunia kelampauan dari perspektif kekinian para pelaku. Para pelaku sejarah jumlahnya kini tidak banyak lagi.

Pada Juli 2007 dan Agustus 2015 penulis berkesempatan berkunjung ke Kantor Legiun Veteran Kabupaten Maros untuk mengumpulkan bahan-bahan tentang organisasi kelasykaran pada periode 1945-1950 dan ingin menjumpai

beberapa nama tokoh yang berperan dalam kancah perjuangan kemerdekaan seperti yang terekam dalam buku teks sejarah, tampaknya sebagian besar nama-nama itu tidak ditemukan lagi. Ada beberapa yang masih hidup, namun karena kondisi kesehatannya yang rapuh mengakibatkan ingatan kelampauannya akan momen penting semasa perjuangan sebagian terlupakan.



Bab II

DINAMIKA ELITE DAN INTERVENSI ASING



A. Dikepung Kekuatan Luar

Dalam Perjanjian Bongaya tanggal 18 November 1667 yang mengatur perdamaian antara VOC dan Gowa diputuskan bahwa raja-raja di Pulau Sulawesi yang lain tidak akan tunduk kepada Gowa, sementara dalam pasal 20 perjanjian itu Distrik Utara (*Noorder Districten*) yang meliputi Maros, Bontoa, Tangkuru, Tanralili, Simbang, Lau, Timboro, Raya, Sudiang, Mallawa, Camba, Baloci, Laiya, Labuaja, Bungoro, Bungo, Labbakang, Marang, Kalukua, Sigeri dan Pangkajene dinyatakan sebagai wilayah VOC. Sejak itu Maros dibagi atas lima wilayah yang dikenal sebagai *Todolimaya ri Marusu*. Kelima wilayah tersebut masing-masing diperintah oleh seorang bangsawan tinggi dengan gelar; “lomo” untuk Marusu, “karaeng” untuk Tanralili dan Simbang, serta “galarang” bagi Bontoa dan Tangkuru.¹

Pada tanggal 12 dan 14 Agustus 1668 pasukan Gowa menyerang Siang dan Maros dengan meriam dan senjata-

¹ ANRI, “Nota van Overgave der Afdeeling Noorder Districten op 24 Juni 1910, W.C. Van der Meulen *Reel no. 32, MvO serie 1e* (1910: 5).

senjata yang lebih kecil, namun berhasil dikalahkan. Gowa kehilangan enampuluh [prajuritnya], ditambah beberapa mayat di medan perang. Pasukan Gowa dipaksa mundur pada tanggal 14 Agustus. Sekitar 5.000, pasukan Bugis bergerak ke Gowa, sementara 2.000, lainnya tinggal untuk menjaga kemenangan mereka di Maros. Raja Bone La Tenritatta Arung Palakka *Matinroe ri Bontoala'* (memerintah 1672-1696) puas dengan kinerja pasukan Bugisnya. Dia mengatakan pada Speelman bahwa "inilah pasukan sejati dan jika orang Bugis menjadi prajurit dia akan mengungguli semua musuh dan bahaya".²

Maros yang berada di utara Makassar ini untuk pertama kali diduduki oleh VOC pada tanggal 15 Oktober 1668 dan menempatkan seorang pedagang senior untuk memimpin daerah ini.³ Dalam perang yang berlangsung untuk merebut Maros, tidak sedikit orang Maros yang terbunuh atau tertangkap dan dijual sebagai budak. Banyak kampung dan sawah yang hancur dan kemudian ditinggalkan, jatuh ke tangan orang Bone. Sementara orang-orang Maros sendiri, ketika perang itu berlangsung dihadapkan kepada dua

² Leonard Y. Andaya. *Warisan Arung Palakka. Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17*. (Makassar: Ininnawa, 2004: 157-158). Diterjemahkan dari *The Heritage of Arung Palakka: A History of South Sulawesi (Celebes) in the Seventeenth Century*. (The Hague Martinus Nijhoff, 1981. Verhandelingen KITLV, 91. KITLV, Leiden, The Nederland) oleh Nurhady Sirimorok. ANRI, "Nota van Overgave der Afdeeling ... (1910: 7).

³ ANRI, "Nota van Overgave der Afdeeling ... (1910: 6); Thomas Gibson. *Kekuasaan, Raja, Syeikh, dan Amtenaar. Pengetahuan Simbolik dan Kekuasaan Tradisional Makassar 1300-2000*. (Makassar: Ininnawa, 2009: 236). Diterjemahkan dari *The Sun Pursued the Moon: Symbolic Knowledge and Traditional Authority Among the Makassar*. (Honolulu: University of Hawaii Press, 2005) oleh Nurhady Sirimorok.

Pada waktu yang sama Arung Palakka membangun aliansi dengan wilayah utara ini yang ditandai dengan dikirimnya utusan ke Maros untuk membicarakannya. Maros menyambut hangat utusan Bugis dan menyatakan kesediaan bergabung melawan Gowa. Dalam sebuah pertemuan dengan lima orang terpenting di Maros, utusan ini diyakinkan bahwa jika pasukan Bugis kelak didaratkan pada tempat yang telah ditentukan, pasukan Maros akan segera bergabung. Satu-satunya permintaan mereka adalah pasukan Bugis jangan menjarah tanah mereka.⁵

Bagi Gowa, Maros demikian vitalnya untuk dikuasai karena merupakan persimpangan penting yang dapat menghubungkan berbagai daerah pesisir dengan pedalaman. Jauh sebelum pertarungan memperebutkan wilayah ini (Maros) antara Gowa, Bone dan VOC, Gowa pernah berseteru dengan Kerajaan Tallo dan Siang ditahun 1520 dan 1535 hanya ingin menguasai Sungai Jeneberang bagi kepentingan politiknya di daerah pesisir. Dan sejak tahun 1533 Tallo menjalin aliansi dengan Marusu untuk menyerang Gowa.⁶ Tumapa'risi Kalonna mengalahkan aliansi ini dalam sebuah perang besar dengan bantuan putra-putranya Karaeng Lakiung dan Karaeng Data.⁷

Pada tahun 1590-an Raja Gowa Tunipasulu

⁵ Leonard Y. Andaya. *Warisan Arung Palakka...*(2004: 157). ANRI, "Nota van Overgave der Afdeeling ... (1910: 7).

⁶ Thomas Gibson. *Kekuasaan, Raja, Syekh...* (2009: 196).

⁷ Karaeng Lakiung dan Karaeng Data kemudian menjadi Raja Gowa yang memerintah masing-masing pada tahun 1546-1565, dan 1517 (hanya memerintah selama 40 hari). Thomas Gibson. *Kekuasaan, Raja, Syekh ...*(2009: 197).

mengumumkan dirinya sebagai satu-satunya karaeng di Gowa dan itu juga berlaku untuk Tallo dan Marusu. Dia mengubah Marusu menjadi budak sejati dengan membagi-bagikan petak sawah di sana ke kalangan bangsawan Gowa.⁸ Karena itu bisa dimengerti mengapa Gowa pada masa kemudian, mengirim anggota pasukan elitnya yang di antaranya adalah putra Sultan Hasanuddin sendiri bersama pasukan Melayu, untuk menjaga sultan dalam memerangi Bone dan Soppeng di Maros.⁹

Pada tahun 1671 dan 1672 Kepala Distrik Cenrana, Camba, Mallawa dan Bengo menandatangani akta penyerahan. Masa ketenangan ini berlangsung sampai tahun 1736 dan selepas itu, ketika Karaeng Bonto Langkasa melakukan serangan dan menguasai daerah utara, praktis Maros berada di bawah hegemoni Kerajaan Gowa. Tetapi kekuasaannya hanya berlangsung singkat. Pada tahun berikutnya, dia diusir oleh Gubernur Sulawesi Smout. Untuk mengamankan Maros, Benteng Valkenburg didirikan. Pada tahun 1738 para kepala distrik kecuali Labakang, mengulangi sumpah setianya dan pada tahun yang sama di Maros ditempatkan seorang *onderkoopman* sebagai wakil politik yang wewenangnya mencakup pula pos Buren di Tanette.¹⁰

Pada tahun 1739 Karaeng Bonto Langkasa mengulangi serangannya terhadap Maros dengan bantuan pasukan Wajo dan Bone. Benteng Valkenburg tidak diserang tetapi segera

⁸ Thomas Gibson. *Kekuasaan, Raja,...*(2009: 204).

⁹ Leonard Y. Andaya. *Warisan Arung Palakka...* (2004: 158).

¹⁰ ANRI, "Nota van Overgave der Afdeeling ... (1910: 7).

bersama pasukan dari Benteng Rotterdam di Makassar, serangan mereka di luar kastil itu pada tanggal 16 Mei berhasil dipatahkan. Karaeng Bonto Langkasa meninggal segera setelah itu karena luka-luka yang dideritanya. Dengan meninggalnya Karaeng Bonto Langkasa suatu periode ketenangan kembali terjadi dan pada tahun 1747 untuk pertama kalinya residen ditempatkan di Maros. Hampir setengah abad perdamaian berhasil dipertahankan sampai pada tahun 1776 pewaris tahta Gowa memasuki Maros, dan bergabung dengan orang-orang yang sejak lama menunjukkan sikap kebencian terhadap VOC/Belanda.¹¹

Seorang bangsawan Bone bernama Daeng Baringan mencoba menawarkan diri untuk membantu mengusir pasukan Gowa tetapi VOC menolak. Tidak ada alasan yang jelas dari penolakan itu, tetapi sepeninggal Arung Palakka kesetiaan orang Bone terhadap VOC mulai merosot. Karena itu, dapat dimengerti mengapa VOC membangun pos pengaman pada tahun 1785 di Liang dan Lamangkere, tak lain adalah untuk menahan ambisi mereka.¹²

Perlahan orang-orang Bone di sini bertambah kuat dan pengaruhnya makin luas sehingga pada tahun 1794 kekuasaan VOC di Maros diambang keruntuhan. Kekuatan Bone dan kelemahan VOC semakin terungkap yang pada tahun 1799 tidak lagi terbukti mampu untuk mengimbangi mereka. Kekuasaan VOC/Belanda makin terjepit dan tinggal menghitung waktu kapan mereka akan keluar dari Maros. Sedikit demi sedikit

¹¹ ANRI, "Nota van Overgave der Afdeeling ... (1910: 8).

¹² ANRI, "Nota van Overgave der Afdeeling ... (1910: 9).

orang Bone menjarah tanah-tanah VOC/Belanda dan pada tahun 1805 *posthouder* di Malangkere dibunuh.¹³

Orang-orang Bone semakin dominan dan mereka kini mencapai puncak kekuasaannya di Maros, yang bagi penduduk di sini berarti bahwa mereka akan ditindas oleh kesewenangan. Raja Bone ke-23 La Tenri Tappu (memerintah 1775-1812) pada saat yang sama mengangkat tiga orang wakil atas tanah-tanah ini, yaitu Sulewatang Lau¹⁴, Sulewatang Raya dan Sulewatang Timboro. Kekuatan mereka terus tumbuh dan ketika pada tahun 1812 kekuasaan diambilalih oleh Inggris, Maros yang direbut oleh Speelman dengan kelimpahannya jatuh dalam kemiskinan. Kedatangan orang-orang Inggris membawa suatu perubahan bagi daerah ini. Pada tahun 1814 orang-orang Bone diusir oleh Letnan Jenderal Nightingale dan mereka kembali menetap di sana setelah Inggris hengkang di tahun 1816.¹⁵

B. Perebutan Sumberdaya: Alokasi dan Otorisasi Kekuasaan

Ketika pada tahun 1816 Gubernur Chasse mengambilalih Maros dari tangan Inggris, kelompok perlawanan yang dipimpin Karaeng Surapole diusir dari Afdeeling Pangkajene dan Labakang, tetapi kekuasaan pemerintah Belanda belum ditegakkan dan pada tahun 1819 masih bisa diketahui bahwa

¹³ ANRI, "Nota van Overgave der Afdeeling ... (1910: 9).

¹⁴ Dalam beberapa arsip pemerintah Belanda Distrik Ri Lau selalu ditulis "Ri Laut", namun penulis menggunakan istilah yang umum dipakai oleh orang-orang Maros sendiri yaitu Lau. Sekarang dalam tata kelola pemerintah RI, Lau menjadi kecamatan tersendiri, yaitu Kecamatan Lau dengan ibukota Barandasi.

¹⁵ ANRI, "Nota van Overgave der Afdeeling ... (1910: 10).

Maros belum direbut kembali oleh Belanda. Tetapi pada tahun 1824 Letnan Kolonel de Stuers melakukannya tanpa mengalami banyak kesulitan, di mana dalam waktu singkat seluruh daerah Maros dan Pangkajene berhasil ditaklukkan. Setelah itu melalui keputusan pemerintah Nomor 10 tanggal 17 Juli 1824 (Lembaran Negara Nomor 31a) Maros kembali dikuasai.¹⁶

Untuk sementara waktu hampir semua kerja wajib dan pemberian upeti dihapuskan. Penghapusan ini untuk menjaga kepentingan para kepala distrik sambil menunggu kebijakan baru untuk menerapkan sistem pajak yang lebih sesuai dan cocok dengan keadaan penduduk setempat.

Dua bulan kemudian, tanggal 17 September 1824, orang-orang Bone kembali memasuki daerah ini dan membujuk para karaeng yang tidak puas untuk menyambut mereka sebagai pembebas. Ajakan itu tidak diindahkan sehingga membuat orang-orang Bone bertambah marah. Ekspresi kemarahan itu mereka tuangkan dengan menduduki wilayah pegunungan Maros di Cenrana, Camba, Labuaja dan Mallawa dan memperkuat diri dengan membangun benteng pertahanan. Pada tanggal 18 Oktober 1824 pertempuran terjadi di Bulu Sepong. Korban berjatuhan; 34 orang prajurit Belanda (beberapa di antaranya adalah perwira), dan 19 orang serdadu pribumi tewas. Di samping itu dua pucuk meriam Belanda direbut.¹⁷ Setelah penghukuman Bone pada

¹⁶ ANRI, *Besluit* No. 10 tanggal 17 Juli 1824 (Staatblad Nomor 31a).

¹⁷ Dalam Lembaran Negara No. 76 tahun 1862 memuat organisasi pemerintahan di *Onderafdeeling Noorder Districten*. Penggabungan afdeeling ini ke dalam Afdeeling Makassar dimuat dalam Lembaran Negara No. 359 tahun 1909.

tahun 1825, Maros kembali berada di bawah kontrol Belanda dan roda pemerintahan mulai berjalan secara teratur.

Namun, situasi normal tidak bertahan lama karena tokoh-tokoh Bone yang sudah kecewa melakukan konsolidasi kekuatan untuk melakukan serangan. Dalam harian *De Locomotief* yang terbit pada 13 November 1900 diberitakan bahwa suatu kerusuhan berkobar di Maros pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 1900 tetapi dapat digagalkan dengan tindakan tegas dan cepat oleh Asisten Residen. Seorang kepala kampung dan enam orang pengikutnya ditangkap.¹⁸ Mereka yang terlibat dalam aksi-aksi tersebut seringkali dianggap oleh pemerintah Belanda sebagai “perusuh” bahkan “perampok” seperti terekam dalam informasi resmi pemerintah dan atau media cetak yang terbit pada masa itu.¹⁹

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang aksi kekerasan yang menewaskan A. J. Muller pada Selasa 27 April 1900. Setelah melalui proses peradilan yang panjang seorang pelaku bernama Tamma akhirnya dibawa ke tiang gantungan untuk dihukum. Harian *De Maccasar Courant* yang melaporkan beberapa hari sebelum eksekusi dilangsungkan yang kemudian berita tersebut dilansir oleh *De Locomotief* yang terbit pada 17 April 1902 memberitakan bahwa suatu kesatuan infanteri sebanyak 50 orang di bawah komando Letnan-2 Brans berangkat ke Camba. Pasukan ini dikirim

¹⁸ PNRI, “Een opstootjes” dalam *De Locomotief* tanggal 13 November 1900, lembar ke-2.

¹⁹ PNRI, lihat misalnya berita yang muncul dalam Koran *De Locomotief* yang terbit pada 21 November 1900, lembar ke-2 dengan judul “Het opstootjes te Maros”.

sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi atas Tamma.²⁰

Asisten Residen Maros Wagner dan Kontrolir Camba J. Tideman hadir untuk menyaksikan eksekusi mati tersebut. Sebelum menemui ajalnya pada 10 April 1902, Tamma terlebih dahulu diarak keliling Camba untuk memperlihatkan kepada masyarakat tentang sosok sang pembunuh. Banyak penduduk pribumi yang ingin melihat langsung proses eksekusi tersebut dan aparat keamanan membiarkannya. Pembiaran ini mungkin sebuah cara untuk memberi ancaman dan teror ketakutan kepada masyarakat bahwa tindakan menentang dan melawan hukum pemerintah Belanda merupakan sebuah kesalahan besar, dan karena itu harus diberi hukuman yang berat. Orang-orang yang menyaksikan itu merasa terharu, dan dalam kepercayaan Bugis tradisional bahwa "barang siapa yang telah menumpahkan darah manusia, harus menebus darah itu dengan darahnya juga".²¹

Tamma menghadapinya dengan tenang dan ia tidak percaya bahwa dirinya akan digantung. Dia telah menduga ketika mendengar hukuman mati bagi dirinya: "Tubuh saya tidak merasakan bahwa saya harus mati".²² Dugaan muncul bahwa Tamma ini adalah seorang penganut teosofi, karena ia juga tidak mau mendengar pengumuman vonis mati yang dijatuhkan kepadanya. "Setelah tubuhnya merasakannya,

²⁰ PNRI, "Diverse Berichten" dalam *De Locomotief*, tanggal 17 April 1902, lembar ke-2.

²¹ PNRI, "Een executie", dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, tanggal 21 April 1902, lembar ke-2.

²² PNRI, "Een executie", dalam *Het nieuws ...* (1902, lembar ke-2).

baru dia bisa percaya".²³

Muller yang dibunuh dalam perjalanan dinas ke Camba meninggalkan seorang istri dan lima orang anak.²⁴ Pembunuhan tersebut jelas tidak hanya sekadar peristiwa kriminal biasa, tetapi menunjukkan bahwa di Sulawesi Selatan di awal abad ke-20 gerakan-gerakan perlawanan mulai berkembang. Sebabnya dapat ditelusuri dari tabiat masyarakat di daerah ini yang cenderung melakukan kejahatan, tidak senang akan keteraturan, mudah terpengaruh oleh harapan-harapan eskatologis, tidak mengerti dan memahami segala peraturan yang dilaksanakan dan hanya tekanan dari peraturan itu yang dirasakan memberatkan.²⁵ Selain alasan-alasan ini, W.J. Coenen menampilkan sebab lain, yakni karena kelompok bangsawan tidak ingin kebesaran dan kekuasaan mereka hilang sehingga mereka mendorong, mendalangi bahkan terlibat dalam gerakan-gerakan yang menunjukkan tanggapan penolakan terhadap pemerintah.²⁶

Selain itu kebijakan politik pemerintah Hindia Belanda yang menghadirkan ketegangan dan ketakutan melalui sejumlah ancaman hukuman pembuangan, dan kerja wajib serta penyeteroran pajak yang sangat memberatkan masyarakat.

²³ PNRI, "Een executie", dalam *Het nieuws* ... (1902, lembar ke-2).

²⁴ PNRI, "De moord op den Heer Muller" dalam *De Locomotief*, tanggal 4 Mei 1900, lembar ke-2.

²⁵ Arsip ARA (Den Haag), W.J. Coenen, "Verslag van het onderzoek inzake het Roverwezen in the Afdeelingen", Verbal 13 Januari 1916, No. 45 hlm. 51-52 sebagaimana dikutip oleh Edward L. Poelinggomang dalam bukunya; *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan. Makassar, 1906-1942*. (Jogjakarta: Ombak, 2004: 7).

²⁶ W.J. Coenen, "Verslag van het onderzoek....(1916: 63) sebagaimana dikutip Edward L. Poelinggomang, *Perubahan Politik dan*(2004: 7).

Kematian Muller yang tragis ini memperlihatkan bahwa di Onderafdeeling Maros ketidakpuasan politik diekspresikan lewat tindakan brutal yang dapat mengancam eksistensi pemerintah (kolonial), dan mengganggu hubungan baik di antara para karaeng.²⁷

Dipilihnya orang Eropa untuk memimpin Hadat Maros memperlihatkan suksesnya strategi politik Belanda yang mempertemukan para karaeng untuk saling berkompetisi di antara mereka. Sementara para karaeng yang duduk sebagai kepala masyarakat adat (kepala distrik) atau regen diposisikan sebagai anggota hadat. Belanda menyaksikan kontestasi itu dengan memainkan peran ganda seakan berada di tengah untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Sejatinya mereka memberi dukungan tersembunyi kepada Galarang Apaka dan Lebbotengae untuk menyingkirkan Turikale dalam percaturan politik lokal.

Sikap ambiguitas ini diambil melalui negosiasi dan kompromi politik dengan para ketua masyarakat adat dan tokoh-tokoh lokal lain. Sebagai imbalannya para karaeng selaku pemimpin masyarakat adat atau “raja” seperti yang biasa digunakan di Kerajaan Marusu, diperbolehkan menjalankan fungsi tradisional, terutama menyangkut agama dan hukum adat. Tetapi untuk kaum bangsawan yang tidak ikut memerintah dipisahkan dari beberapa fungsinya yang lebih opresif, seperti perpajakan dan pengerahan tenaga kerja, yang diambilalih oleh para birokrat kolonial.

²⁷ PNRI, “Moordberichten uit Celebes”, dalam *De Locomotief*, tanggal 28 April 1900, lembar ke-2.

Karaeng Turikale mengancam keterlibatan pejabat kolonial dalam urusan hadat karena melihat sebagai bentuk penaklukan ekonomi dan politik, dan wujud intervensi asing yang dapat mengancam kedaulatan para pemimpin masyarakat adat di Maros. Sementara bagi Galarang Apaka dan Lebbotengae keterlibatan itu merupakan aliansi strategis yang dapat melindungi Maros dari ancaman luar. Akibat penolakan itu, Karaeng Turikale, dan Karaeng Marusu (yang ikut kemudian) mulai dikucilkan dari urusan pemerintahan dan tak diberi lagi peran-peran penting dalam urusan hadat.

Perbedaan kepentingan antarelite memperlihatkan bahwa tidak ada kedaulatan mutlak dipegang oleh satu kekuatan saja. Dalam konteks untuk mendapatkan supremasi berbagai pihak bertarung memperebutkannya. Dengan pandangan dunia yang berbeda dan orientasi kekuasaan yang didukung jejaring sosial yang berkembang, elite makin terpolarisasi ke dalam kelompok yang beragam berdasarkan ideologi, organisasi dan kepentingan. Kepentingan yang berbeda antarelite melahirkan polarisasi kekuatan antara sekutu dan seteru. Para elite memainkan dua peran ini dalam menghadapi kekuasaan asing termasuk ketika membangun relasi dengan para bangsawan penguasa bahkan antarsesama elite, dan dengan kaum kolonial.

C. Masyarakat Adat dan Pembentukan Birokrasi Modern

Onderafdeeling Maros dibentuk pada tanggal 6 Mei 1923 sebagai hasil fusi dari 16 kesatuan masyarakat adat yang dalam hubungan antara satu dengan lainnya bersifat sangat longgar. Ke-

16 masyarakat adat tersebut dikelompokkan dalam tiga bagian (federasi) berdasarkan letak dan bentangan geografisnya, yaitu di dataran utara Maros yang disebut "Todo Lima", mencakup; 1). Marusu, 2). Tanralili, 3). Lau, 4). Bontoa, 5). Simbang, 6). Turikale. Di dataran selatan membentuk "Galarang Appaka" yang meliputi; 7). Bira, 8). Biringkanaya, 9). Sudiang, 10). Moncongloe. Dan yang berada di wilayah yang dikelilingi perbukitan dan pegunungan Bone, Gowa dan Maros yang dinamakan federasi "Lebbotengae", terdiri atas; 11). Camba, 12). Cenrana, 13). Mallawa, 14). Gantarang Matinggi, 15). Wanuwawaru, 16). Laiya.²⁸

Selanjutnya wilayah distrik utara (*Noorder Districten*) ini dibagi lagi dalam tiga distrik pajak (*pachtdistrik*), yaitu Maos, Pangkajene, dan Sigeri dan distrik-distrik pegunungan (*bergregent-schappen*). Pada masing-masing wilayah administrasi pemerintahan ini ditempatkan seorang kontrolir dibantu oleh beberapa kolektir (*collecteur*), kecuali Maros (karena berada langsung di bawah asisten residen bagian pemerintahan Maros). Setiap distrik pajak dan distrik-distrik pegunungan terdiri dari beberapa distrik yang masing-masing berada di bawah penguasa bumiputera. Pegawai bumiputera ini umumnya ditempatkan sebagai jaksa, dan

²⁸ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, W.G. van Der Wolk, "Kort Apercu Betreffende de Onderafdeling Maros" dalam *Memorie van Overgave W.G. der Wolk*, Controleur van Maros, 1946-1947. Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Margariet M. Lappia, (Makassar: Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2006: 132). Sebelum dibentuk Onderafdeeling Maros, Gantarang Matinggi dan Wanuwawaru merupakan bagian dari wilayah Gowa, Labuaja dan Bengo kemudian digabungkan dengan Cenrana sedangkan Baloci selepas tahun 1926 menjadi bagian dari Pangkajene.

seorang lagi menduduki posisi sebagai juru bahasa.²⁹

Federasi Todo Lima beranggotakan daerah-daerah yang dahulu menjadi bagian dari Kerajaan Marusu yang terdiri atas Marusu, Simbang, Tanralili, Bontoa, dan Tangkuru. Kekuasaan Todo Lima terus berkembang dan wilayah-wilayah di sekitarnya mengalami perubahan dan menjadi distrik tersendiri seperti Lau di sebelah timur, Raya di barat dan Timboro di selatan yang masing-masing dipimpin oleh seorang sulewatang.³⁰

Dalam kelompok masyarakat adat Todo Lima, Marusu yang lebih diperhitungkan sebagai ketua federasi, sedangkan di Lebbotengae adalah Arung Camba.³¹ Di wilayah kekuasaan Galarang Apaka, sebelum tahun 1923, Bira, Biringkanaya dan Moncongloe merupakan bagian dari daerah Tallo. Namun kemudian, wilayah ini bersama dengan Kepulauan Spermonde dan sebagian dari Makassar membentuk suatu onderafdeeling tersendiri. Kontrolirnya mula-mula berkedudukan di Suwangga (Ujung Tanah) dan kemudian pindah ke Bulurokeng (Bira). Baru pada tahun 1906 Sudiang digabungkan dengan Onderafdeeling Tallo.

Pada tahun 1925 Onderafdeeling Tallo dihapuskan dan sebagian wilayahnya dimasukkan di bawah pemerintahan Makassar dan empat masyarakat adat (Bira, Biringkanaya, Sudiang, Moncongloe) digabungkan ke Onderafdeeling Maros. Setelah itu istilah Galarang Appaka muncul menggantikan gelar

²⁹ Edward L. Poelinggomang. *Perubahan Politik dan ...* (2004: 42-43, 89).

³⁰ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, W.G. van Der Wolk, "Kort Apercu Betreffende..." (2006: 133).

³¹ Dahulu Arung Camba memimpin "Pitu Bila-bila" yang meliputi Distrik Camba, Cenrana, Labuaja, Bengo, Mallawa, Baloci dan Laiya.

karaeng yang sudah digunakan beberapa waktu sebelumnya.³²

Tiga tahun setelah pembentukan Onderafdeeling Maros, pemerintah Belanda melakukan penataan kembali keanggotaan federasi dengan memasukkan tujuh wilayah adat yang berada di utara Maros, yaitu Mandale, Segeri, Marang, Labakkang, Bungoro, Pangkajene dan Baloci ke dalam "Onderafdeeling Maros Besar". Pembagian ini menimbulkan gejolak terutama bagi Pangkajene dan Lau yang merasa memiliki potensi ekonomi dan sumberdaya pertanian dan perairan yang besar sehingga menuntut dilakukannya penataan ulang secara adil. Karaeng Lau mengajukan tuntutan agar mereka diijinkan lepas dari Todo Lima dan membentuk federasi sendiri.

Tuntutan tersebut dipenuhi pemerintah Belanda dengan membentuk Federasi Lau pada 1926 dan menjadikan Lau sebagai ketua federasi yang beranggotakan Lau (sendiri), Raya dan Tangkuru sedangkan Pangkajene tetap dalam formasi awal. Sementara distrik Pangkajene melalui Controleur W.C. Krygmans menyetujui penggabungan itu dengan menyerahkan seluruh kas daerah yang berjumlah f. 357.354,63 kepada Onderafdeeling Maros Besar sebagai kas bersama.³³

Pembagian ini menuntut agar setiap anggota federasi

³² Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, W.G. van Der Wolk, "Kort Apercu Betreffende..." (2006: 135).

³³ ANRI, *Memorie van Overgave van de Controleur Onderafdeeling Maros* A.S.L. Spoor, 16 Maret 1926, reel no. 32, serie 1e (1926: 35-36). Rincian jumlah kas daerah di onderafdeeling Maros (khususnya di Distrik Pangkajene) adalah sebagai berikut: Mandale (f.6.776,12), Segeri (f. 21.103,46), Marang (f.13.175,72), Labakkang (f. 27.444,49), Bungoro (f. 12.578,13 ½), Pangkajene (f 27.566,18), dan Baloci (f 1.710,16). Rincian ini dikutip dari sumber ANRI, *Memorie van Overgave van ...* (1926: 35-36).

dapat bekerja secara aktif untuk meningkatkan pemasukkan daerah dengan berbasiskan kepada kemandirian individu dan kelompok untuk menjalankan urusan internal masing-masing serta tetap menjaga hubungan baik antarmasyarakat adat. Hubungan antarmasyarakat adat beraras pada prinsip kemitraan yang dibangun dan diatur berdasarkan semangat “kebersamaan dan saling pengertian”. Model relasi seperti ini juga beraras pada hubungan timbal balik yang saling menguntungkan serta pengakuan eksistensi kedaulatan dan integritas masing-masing kesatuan masyarakat adat.

Pasca pembentukan federasi tersebut muncul ketidakpuasan dari kelompok Todo Lima yang dimotori Turikale, yang merasa memiliki posisi lebih tinggi dan penting dibandingkan Lebbotengae dan Galarang Appaka. Todo Lima menginisiasi untuk menghadirkan kembali sebagian dari sistem birokrasi lama yang lebih kuat dengan melakukan reorganisasi pemerintahan. Hal ini dimaksudkan sebagai sebuah cara persemiaan baru antara unsur lama dengan sistem modern untuk memberi ruang gerak yang lebih luas kepada karaeng guna mengambil kebijakan-kebijakan strategis dalam mengelola daerahnya.

Ide kemandirian yang diusung Todo Lima untuk membentuk Hadat Maros terus digulirkan dan mengundang reaksi pemerintah Belanda dengan membiarkan gagasan itu berkembang. Pemerintah Belanda memahami konstelasi politik yang berkembang atas ide pembentukan itu dengan harapan dapat memperkuat model federasi yang muncul sebelumnya untuk mengambil peran sebagai “perekat bagi

pembentukan masyarakat hukum yang lebih besar”.³⁴

Lembaga baru ini akhirnya dibentuk pada tahun 1927, beranggotakan lima kepala masyarakat adat; tiga ketua federasi (Todo Lima, Lebbotengae, Galarang Appaka) ditambah dua kepala masyarakat adat Todo Lima. Dari lima anggota hadat ini kemudian dipilih seorang ketua oleh para kepala masyarakat adat secara bersama-sama. Dewan Hadat ini menjalankan pemerintahan harian atas nama para kepala masyarakat adat berdasarkan mandat yang diberikan.³⁵

Perbedaan yang tajam tentang posisi, kewenangan, tugas dan kewajiban kepala hadat yang muncul di antara para ketua federasi dan para kepala masyarakat adat mengakibatkan gagalnya dicapai kesepakatan untuk memilih salah seorang di antara mereka sebagai ketua hadat. Reaksi perlawanan terhadap Turikale yang pada saat itu menjadi Ketua Federasi Todo Lima oleh Lebbotengae dan Galarang Appaka membuat peta politik berubah secara krusial.

Para kepala federasi (Lebbotengae dan Galarang Appaka), lebih menginginkan orang Eropa untuk memimpin Hadat Maros daripada dikuasai oleh Turikale. Bahkan dalam tubuh Todo Lima sendiri, di mana Turikale menjadi Ketua Federasi, terdapat friksi yang menentang ambisi Karaeng Turikale menjadi Ketua Hadat seperti yang diperlihatkan oleh Tanralili dan Bontoa. Sementara Karaeng Marusu, Simbang dan Lau tidak menunjukkan sikap perlawanan karena status

³⁴ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, W.G. van Der Wolk, "Kort Apercu Betreffende..."(2006: 135).

³⁵ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, W.G. van Der Wolk, "Kort Apercu Betreffende..."(2006: 136).

wilayahnya yang merupakan daerah vassal Turikale.³⁶

Karaeng Marusu I Pabela Daeng Marongrong tidak mengambil sikap dalam merespon konstelasi politik yang berkembang karena ia sendiri harus membangun komunikasi politik dan membenahan internal atas sikap kritis sejumlah tokoh yang kurang bersimpati kepadanya. Perasaan tidak senang terhadap Karaeng Marusu ini dilatari oleh gugatan terhadap watak kepemimpinannya yang kurang tegas, terutama kegagalannya mempertahankan Marusu sebagai figur sentral dalam Federasi Todo Lima.



Karaeng Marusu ke-16, I Pabela Daeng Marongrong Sultan Abdul Hafid (memerintah 1923-1944). Lukisan yang berangka tahun 1997 (?) ini direpro atas ijin Andi Abdul Waris Tadjuddin Karaeng Sioja, salah sorang pewaris Kerajaan Marusu, pada 26 Juli 2015. Lukisan tersebut dipajang di ruang depan Balla Lompoa Kasikebbo Maros.

³⁶ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, W.G. van Der Wolk, "Kort Apercu Betreffende... (2006: 136).

Situasi ini dimanfaatkan pemerintah Belanda dengan memberi dukungan kepada kelompok kritis yang mewacanakan pergantian pucuk pimpinan kekaraengan. Termasuk misalnya dengan mendorong Karaeng Ngago (seorang pedagang besar dan tokoh berpengaruh yang tinggal di Kasikebo. Meski tidak pernah memperoleh pendidikan formal, tetapi ia cukup dikenal di wilayah Todo Lima dan sekitarnya) untuk melakukan gerakan pembangkangan terhadap Karaeng Marusu dan Karaeng Turikale.³⁷

Sikap penentangan itu disebabkan oleh pandangan pribadi para ketua masyarakat adat bahwa Karaeng Turikale adalah sosok yang ambisius, "kaku, kasar dan picik. Merasa dirinya orang besar dan penting. Dan tidak akan berhenti sebelum keinginannya tercapai".³⁸ Upaya menggagalkan keinginan Karaeng Turikale menjadi Ketua Hadat Maros berhasil diwujudkan dengan ditetapkannya Kepala Onderafdeeling Maros (seorang aparat pemerintah Belanda) sebagai Ketua Hadat sementara para ketua federasi dan para kepala masyarakat adat ditunjuk sebagai pembantu untuk membentuk dan menjalankan pemerintahan harian. Dampak dari perseteruan itu membuat Karaeng Turikale tidak diberi peran berarti dan hanya memiliki kewenangan semu, dengan tugas-tugas yang kurang penting yang kemudian akan dipertimbangkan menjadi penyuluh masyarakat dan sebagai pemegang kas pemerintahan³⁹

³⁷ Lihat Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, W.G. van Der Wolk, "Kort Apercu Betreffende...(2006: 1387).

³⁸ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, W.G. van Der Wolk, "Kort Apercu Betreffende...(2006: 137).

³⁹ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, W.G. van Der Wolk, "Kort Apercu Betreffende...(2006: 137).

Di Tanralili dan Lau hingga tahun 1921 pejabat pemerintah Belanda masih bertugas sebagai pengelola kas. Belum diserahkannya pengelolaan kas kepada pejabat pribumi karena Belanda menganggap bahwa jumlahnya masih terlalu sedikit sehingga dibutuhkan waktu untuk meningkatkan pemasukan lewat berbagai usaha dan kerja keras.

Di samping itu, belum tersedianya kaum bangsawan terdidik dan yang berkompoten untuk mengelola keuangan secara baik. Dibutuhkan waktu untuk mencoba bahwa pengelolaan kas berjalan baik dan efektif dengan berpedoman kepada struktur kas adat yang sudah dibuat.⁴⁰ Beberapa pejabat pribumi seperti Kepala Distrik Lau, tidak terbiasa dengan pengelolaan sarana keuangan sendiri, sementara Tanralili tidak memiliki kepala adat dan masih diperintah oleh salah seorang aparat pemerintahan Belanda yang bertugas di Maros.⁴¹

Hingga akhir tahun 1921 pembagian kas didasarkan pada perbandingan jumlah pekerja komunal yang besarnya mencapai 18.050 orang di seluruh Onderafdeeling Maros. Di Tanralili misalnya, pekerja komunal berjumlah 2.000 orang, maka dengan demikian kas yang dapat dihasilkan mencapai f. 11.050 dengan modal awal f. 1221,66, dan Federasi Lau dengan modal f. 1.727,51. Kedua kas ikatan adat ini berkembang pesat.⁴²

Pasca pengunduran diri Karaeng Tanralili Abdul Canie Daeng Manromo pada tahun 1925 pengelolaan kas adat diserahkan kepada aparat pemerintah Belanda. Dalam Laporan

⁴⁰ ANRI, *Memorie van Overgave van ...* (1926: 39).

⁴¹ ANRI, *Memorie van Overgave van ...* (1926: 39).

⁴² ANRI, *Memorie van Overgave van ...* (1926: 40).

Serah Terima Jabatan (*Memorie van Overgave*) Kontrolir Maros A.S.L. Spoor tanggal 16 Maret 1926 terdapat kenaikan kas daerah yang cukup signifikan. Spoor mencatat bahwa dengan modal awal f. 1221,66 (1 Januari 1922) berkembang menjadi f. 6692,97 pada akhir tahun 1922. Angka pertumbuhan terus meningkat menjadi f. 12161,705 pada tahun 1923, kemudian turun menjadi f. 10255,19 (1924), dan diakhir masa pemerintahannya (1925) Spoor menghitung pemasukkan berkisar pada angka f. 7386,67.⁴³ Penulis tidak memperoleh data yang cukup tentang perkembangan kas Tanralili selama dipegang oleh Karaeng Tanralili yang baru, Andi Mananggongi Daeng Matimu.

Berbeda dengan Distrik Tanralili, di Distrik Lau pertumbuhan kas justru naik cukup fantastis. Selama Pappe Daeng Masikki menjadi Kepala Distrik menggantikan kakeknya yang mengundurkan diri karena faktor usia dan kesehatan, kenaikan selama periode 1922-1925 cukup besar seperti tampak pada rincian berikut; dari f. 1.727,51 (1 Januari 1922) menjadi f. 2.860,81 pada akhir tahun 1922, lalu pada 1923 naik menjadi f. 6.082,49, terus berkembang mencapai f. 8.860,67 pada 1924, dan ditutup dengan angka f. 10.237,11 di tahun 1925. Sementara kas adat Bontoa (1922-1925) dengan modal awal f. 1985 (akhir tahun 1922) menjadi 4509,72 pada tahun 1923.

Kenaikan ini tidak bertahan lama karena kondisi ekonomi masyarakat yang kian terpuruk akibat hama penyakit yang menggerogoti tanaman yang berujung pada buruknya hasil panen. Di samping sikap masyarakat yang masih malas

⁴³ ANRI, *Memorie van Overgave van ...* (1926: 41).

memenuhi kewajibannya membayar pajak dan mengikuti kerja wajib, juga ada indikasi penyelewengan yang dilakukan aparat terhadap dana yang terkumpul. Hal ini terbukti bahwa diakhir tahun 1924 kas yang terkumpul hanya f.4108,93 dan terus merosot hingga f.3421 pada penghujung tahun 1925.⁴⁴

Sementara di Federasi Galarang Appaka kondisi keuangannya sangat menyedihkan sehingga banyak rencana kerja seperti perbaikan sarana infrastruktur jalan, jembatan dan saluran irigasi tidak berjalan. Pada awal tahun 1923 keuangan federasi ini hanya f.1928 yang kemudian meningkat sebesar f.3517,25 pada akhir tahun 1923, dan naik lagi sekitar f.4055,51 pada tahun 1924, dan anjlok menjadi f.2814, 76 pada penghujung tahun 1925.⁴⁵

Persaingan politik antarelite menjadi salah satu penyebab fluktuatifnya kondisi tersebut. Tuntutan Simbang untuk keluar dari ikatan adat Turikale dan menjadi ikatan adat yang otonom menambah kerunyaman hubungan antartokoh. Kepala Distrik Turikale Palaguna Daeng Marowa ingin melepaskan semua tuntutan keuangannya atas Simbang, seperti hak pasar, *kalong tedong*. Sebagai Karaeng Simbang pertama yang dipilih dan diangkat adalah Sulewatang Turikale yang tinggal di Pakali, yang kemudian meletakkan jabatan itu untuk mempromosikan putra sulungnya bernama Amirudin Daeng Pasolong.

Tugas awal kepala Distrik Simbang yang baru ini adalah memajukan kehidupan perekonomian dengan terus menggenjot pemasukan keuangan di daerahnya. Tampaknya tugas yang diberikan pemerintah Belanda dijalankannya

⁴⁴ ANRI, *Memorie van Overgave van ...* (1926: 41).

⁴⁵ ANRI, *Memorie van Overgave van ...* (1926: 42).

dengan baik yang ditunjukkan lewat peningkatan pemasukan kas yang semula hanya memiliki f.1649 pada awal tahun 1923 menjadi f.3720,98 pada akhir tahun 1923. Meskipun turun pada tahun 1924 yang hanya mampu mengumpulkan f.3240,40, namun diakhir tahun 1925 kas daerah naik sebesar f. 5035,14.⁴⁶

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa Marusu dan Turikale telah muncul lebih awal dibandingkan ikatan adat lain. Kedua kelompok masyarakat adat ini pernah menolak ide pembentukan federasi di Maros karena melihat bahwa pembentukan itu merupakan wujud intervensi kolonial terhadap urusan internal masyarakat adat. Mereka tidak mau melepaskan hak yang telah diperolehnya secara turun temurun untuk mengelola daerahnya sesuai tradisi. Karena itu, pada akhir tahun 1922 kas Onderafdeeling Maros dihapuskan, dan kedua "ikatan adat" ini diberi modal awal berupa "kas adat", meskipun ada keberatan dari kedua Kepala Distrik terhadap kata "ikatan adat" dan "kas adat".

Terhadap istilah yang pertama ("ikatan adat"), Kepala Distrik Marusu Pake Daeng Masiga merasa keberatan atas hilangnya setoran wajib yang diperoleh dari sewa los di pasar. Penghapusan setoran wajib atas sewa pasar yang kemudian selanjutnya dimasukkan ke dalam "kas adat" akan mengurangi hak dan kewenangan Karaeng Marusu untuk memperoleh pendapatan resmi di wilayahnya. Selain itu juga dapat berpengaruh terhadap kewibawaan, kekuasaan dan kehormatan yang selama ini diterimanya sebagai bentuk "penghargaan" masyarakat terhadap dirinya.

⁴⁶ ANRI, *Memorie van Overgave van ...* (1926: 43).

Pemutusan “jaring pemasukan” ini sebagai upaya pemerintah Belanda untuk mendelegitimasi kekuasaan Karaeng Marusu dan melemahkan pengaruhnya dalam politik lokal. Pemerintah Belanda berdalih bahwa meskipun pemasukan karaeng hilang namun tetap menerima ganti rugi yang layak sebesar f.50/bulan untuk Pasar Pangkasalo. Sementara Kepala Distrik Turikale Palaguna Daeng Marowa menerima f.316/bulan untuk sewa Pasar Redaberu, Macopa, Leangleang, Tambua dan Pakali. Semua penghasilan adat lain diserahkan kepada Kepala Distrik itu pada tahun 1923.⁴⁷



I Pake Daeng Masiga Sultan Djamaluddin Karaeng Marusu (1870-1923) (Sumber: Dokumentasi Keluarga Andi Abdul Waris Tadjuddin Karaeng Sioja, dipajang di ruang tengah Balla Lompoa Kasikebbo Maros. Direpro atas ijin pemilik pada 26 Juli 2015)

⁴⁷ ANRI, *Memorie van Overgave van ...* (1926: 46).

Sependinggal Karaeng Marusu Pake Daeng Masiga pada tanggal 3 Agustus 1923, maka terhitung sejak 1 Januari 1924 penafsiran anggaran masyarakat adat Marusu ditata kembali. Semua penghasilan adat mengalir ke kas Marusu dan Karaeng Marusu yang baru, Abdul Hafid Daeng Marongrong menerima gaji bulanan sebesar f.250, yang diambil dari hasil sebagian tanah pusaka di Toranu. Tanah di sini tidak disewakan karena posisinya sebagai *galung arajang*. Namun *galung arajang* akan kehilangan makna apabila Karaeng Marusu melepaskan sebagian besar lahan itu kepada anggota keluarganya yang lain.

Sebagian besar hasil sawah Toranu diberikan kepada karaeng dan selanjutnya digunakan untuk menyambut para kepala adat dan ulama yang mengunjunginya terutama pada hari Kamis petang dan Jumat, seperti tuntutan adat. Gajinya selaku Kepala Distrik memang tidak besar sementara biaya untuk menutupi kebutuhan keluarga terus beranjak naik. Karena itu, pada akhir tahun 1925 Abdul Hafid Daeng Marongrong mengajukan usulan kenaikan gaji kepada pemerintah Belanda melalui Kontrolir Maros. Usulan itu kemudian diteruskan oleh kontrolir melalui suratnya tanggal 29 Desember 1925 No. 3734/H19) kepada Gubernur Sulawesi dan Daerah Bawahannya di Makassar.

Satu bulan kemudian Gubernur memberikan jawaban melalui sepucuk surat yang dikirim kepada Kontrolir Maros tanggal 6 Januari 1926 Nomor 10/III. Isinya, menerima usulan kenaikan gaji Kepala Distrik Marusu dengan gaji standard sebesar f.150/bulan, dan tunjangan pribadi f.150/bulan

ditambah penghasilan bulanan yang lain sehingga jumlah keseluruhannya adalah f.616/bulan. Jumlah ini belum termasuk hasil yang diperoleh dari sawah di Malaulau sebanyak 2.400 ikat padi.⁴⁸ Meskipun pendapatannya dianggap besar namun, tetap dianggap tak mampu menutupi biaya operasional karaeng yang terus bertambah. Ia tidak sekadar mengurus keluarga dekat yang hidup bersamanya melainkan juga harus memperhatikan tersedianya cukup pangan bagi warga yang sangat bergantung kepada kemurahan hati sang karaeng.

Di Distrik Turikale sepeninggal Palaguna Daeng Marowa kondisi perekonomian makin runyam. Penggantinya, Abdul Hamid Daeng Manassa dikenal sebagai pribadi yang tak bisa diatur, pelit dan lebih mendahulukan kepentingan pribadi. Mantan Kontrolir Maros Spoor melihat Abdul Hamid Daeng Manassa sebagai sosok yang “sangat hemat, dana kas disimpan dan tidak pernah diserahkan kecuali bila sangat dibutuhkan. Ia sangat buruk dalam mengatur keuangan, dan lebih suka memberikan apa yang dia miliki ketika diminta dalam bentuk uang atau padi... Ia, pribadi yang merosot wibawanya, dan karena tindakannya, semuanya bisa lenyap tanpa manfaat yang berarti”. Pada masanya keuangan Distrik Turikale terancam bangkrut, dari f.4178 diawal tahun 1923 anjlok ke angka f.268,02 pada akhir tahun 1925.⁴⁹

Penurunan ini diduga berasal dari kurang aktifnya roda pemerintahan di Turikale. Hal ini mendorong Kontrolir

⁴⁸ ANRI, *Memorie van Overgave van ...* (1926: 49).

⁴⁹ ANRI, *Memorie van Overgave van ...* (1926: 50-51). Kas awal pada januari 1923 berjumlah 4178 dan berkembang menjadi f. 5011,085 pada akhir tahun 1923. Keadaan ini merosot tajam menjadi f.1137,145 pada tahun 1924.

Maros menata kembali pelaksanaan pemerintahan dengan rencana menempatkan seorang aparat Belanda untuk mengelola keuangan distrik sambil menunggu sosok yang tepat dari Turikale untuk menjalankannya. Tabel berikut akan menunjukkan bagaimana kemampuan para Kepala Distrik di seluruh wilayah Onderafdeeling Maros mengumpulkan dan mengelola keuangan daerah berdasarkan jumlah saldo yang tersimpan di Bank Rakyat Celebes pada triwulan pertama tahun 1925.

Tabel 1: Jumlah Dana dari Tiap-tiap Lembaga Adat yang Disimpan di Bank Rakyat Celebes pada Triwulan Pertama tahun 1925⁵⁰

No	Lembaga Adat	Jumlah Kas (f.)	Ket.
1	Gallarang Appaka	2.100,	
2	Tanralili	5.500,	
3	Marusu	3.000,	
4	Turikale	-	Kas nihil
5	Simbang	3.200,	
6	Lau	8.500,	
7	Bontoa	3.800,	
8	Lebbotengae	3.000,	
9	Pangkajene	25.200,	Jlh kas tertinggi
10	Bungoro	6.200,	
11	Labbakang	14.200,	
12	Marang	8.400,	
13	Segeri	8.900,	
14	Mandalle	6.100,	
15	Baloci	1.900,	

⁵⁰ ANRI, *Memorie van Overgave van ...* (1926: 52).

Kas adat yang tersimpan di bank tersebut merupakan dana cadangan yang hanya dapat digunakan pada saat genting atau darurat seperti gagal panen, hama penyakit, dan pelaksanaan proyek masyarakat adat seperti perbaikan saluran irigasi. Gaji dan tunjangan para Kepala Distrik tidak diambilkan dari dana tersebut. Dalam tahun 1926 telah disusun daftar penghasilan dan besaran gaji yang diterima oleh para Kepala Distrik (Kepala Adat) setiap bulan sebagai berikut;

Tabel 2: Daftar Penghasilan dan Gaji yang Diterima oleh Setiap Ketua Lembaga Adat di Onderafdeeling Maros tahun 1926⁵¹

No	Lembaga Adat	Penghasilan Adat (f.)	Gaji yang Diterima (f.)
1	Bira		70
2	Biringkanaya	4215,19	65
3	Sudiang	-	30
4	Moncongloe	-	25
5	Tanralili	5.593,21	125
6	Marusu	7.100,22	250
7	Simbang	7.375,72	200
8	Turikale	15.749,83	616
9	Lau	3.233,93	150
10	Bontoa	2.718,37	150
11	Baloci	2.918,62	125
12	Pangkajene	17.852,96	125
13	Bungoro	7.638,42	425
14	Labakang	13.396,57	175
15	Marang	6.175,76	450
16	Segeri	10.800,48	350
17	Mandale	4.849,81	200
18	Baloci	-	125
19	Cenrana	-	100
20	Camba	-	115
21	Mallawa	3121,07	45
22	Laiya	-	20
23	Gantarang Matinggi	-	10
24	Wanuawaru	-	10

⁵¹ ANRI, *Memorie van Overgave van ...* (1926: 53).

Beberapa lembaga adat yang nihil penghasilannya seperti Sudiang, Moncongloe, Cenrana, Camba, Gantarang Matinggi dan Wanuwawaru (lihat tabel di atas) masih tetap menerima gaji yang diambilkan dari kas onderafdeeling. Dana kas tetap tersedia sebagai hasil kelola sawah adat, sewa pasar, dan sumber-sumber penghasilan lain yang dikoordinir oleh kontrolir selaku Ketua Lembaga Hadat. Namun hingga penghujung tahun 1927 para kepala masyarakat adat tersebut terancam tidak dapat menikmati lagi gaji bulanan karena kinerja aparatur yang ditugaskan untuk mengumpulkan dana tersebut sering ceroboh. Kecerobohan itu disebabkan oleh tingkat pendidikan aparatur yang tidak memadai, kesadaran warga membayar pajak rendah, dana yang terkumpul digunakan di luar pos yang direncanakan dan atau dipinjam lebih dulu oleh karaeng atau keluarga para bangsawan serta tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh aparatur.

Dari sini muncul kreatifitas para tokoh adat memobilisasi masyarakatnya untuk menunjukkan loyalitas dan dedikasi kepada pemimpinnya melalui berbagai cara. Para kepala kampung yang tak lain adalah kerabat dekat mereka, dikerahkan untuk mengumpulkan dana, beras, hasil-hasil laut dan kebun untuk kepentingannya. Melalui perselingkuhan politik seperti ini para kepala masyarakat adat terkadang dapat menghadirkan model yang dinamis, tidak untuk kepentingan pemerintahan yang lebih luas tetapi untuk memenuhi hasrat dan ambisi politik mereka guna memperteguh status sosialnya sebagai orang terpandang.

D. Penataan Struktur Kelembagaan: Integrasi dan Perubahan

Setelah kepergian Inggris beberapa daerah yang dulu pernah dikuasainya diserahkan kepada pemerintah Belanda. Salah satu di antaranya adalah Onderafdeeling Maros. Beberapa karaeng menghadap kepada pejabat Belanda untuk bermohon agar wilayah mereka digabungkan dengan Turikale dan berada langsung di bawah pemerintahan Belanda. Permohonan itu disetujui dan penggabungan pun segera dilakukan. Dampak dari penggabungan tersebut mengakibatkan bahwa jumlah pejabat lokal bertambah banyak. Para pemimpin baru yang bergelar “punggawa” ini menuntut pula agar daerah mereka dimekarkan dan ditetapkan sebagai distrik seperti di tempat lain. Akhirnya jumlah desa di Turikale bertambah banyak sehingga sebuah distrik perlu dibentuk. Pada tahun 1850 La Uma Daeng Manrape diangkat sebagai Kepala Distrik [Turikale] yang pertama.⁵²

Selama masa kekuasaan Gowa pembagian ini tetap berjalan dan mengalami perubahan sejak Bone memainkan pengaruhnya atas daerah ini hingga pertengahan abad ke-19. Sejak Todolimaya dihapuskan diawal abad ke-19, maka wilayah itu tetap berada di bawah perintah para Sulewatang yang menjalankan kekuasaannya atas nama Raja Bone. Para Sulewatang tersebut terdiri dari; 1). Sulewatang Lau (barat), 2). Sulewatang Raya (timur), dan 3). Sulewatang Timboro (selatan).

Pada tahun 1862 Kepala Distrik Cenrana dan Mallawa mencoba menolak penempatan seorang konrolir di Camba

52

dengan berbagai cara dan mengusulkan agar kontrolir tersebut ditempatkan di ibukota Maros. Namun Gubernur Suawesi dan Daerah Bawahannya Kroesen bergeming. Dua tahun setelah pelantikan itu (tahun 1864) Kepala Distrik Camba La Pancara dengan dukungan para Kepala Distrik lain, bangkit melakukan perlawanan terhadap pemerintah Belanda.

Sementara itu Kontrolir de Villeneuve berusaha meredakan ketegangan dengan menghimbau kepada para Kepala Distrik agar tetap patuh dan setia kepada perjanjian awal, yang mengharuskan semua penguasa lokal untuk mengakui Belanda sebagai sekutu utama, dan tidak terprovokasi oleh hasutan yang dapat menciptakan gangguan keamanan. Himbauan itu tidak diindahkan. Untuk menghentikan perlawanan suatu kesatuan yang terdiri dari 120 orang tentara diberangkatkan ke Camba. Setelah usahanya yang gagal untuk mematahkan gempuran dari kesatuan tentara kolonial Belanda akhirnya La Pancara melarikan diri ke Cani, Bone. Ia kemudian diturunkan dari jabatannya dan digantikan oleh menantu prianya sebagai Kepala Distrik.⁵³

Lewat perantaraan Raja Bone Karaeng Segeri pada tanggal 3 April 1865 La Pancara menyerahkan diri kepada Asisten Residen Maros dan pada tanggal 23 April dibawa ke Batavia. Setahun setelah menjalani hukumannya, ia melarikan diri dan kemudian muncul kembali di Camba, Cenrana dan Mallawa.⁵⁴

Kembalinya La Pancara memberikan energi baru bagi

⁵³ ANRI, "Nota van Overgave der Afdeeling ... (1910: 19).

⁵⁴ ANRI, "Nota van Overgave der Afdeeling ... (1910: 20).

munculnya semangat baru untuk hidup bebas dari segala kewajiban yang membelenggu. Upaya perlawanan terhadap dominasi kekuasaan asing dicoba ditata kembali. Hasilnya, pada tahun 1868 kontak senjata terjadi di Kampung Samunre, Mallawa. Perlawanan bersenjata dengan intensitas tinggi ini membuat Asisten Residen Maros mengirim pasukan infantri dengan jumlah yang cukup besar. Para kesatuan militer ini membakar hampir seluruh isi kampung itu. Namun, pada malam tanggal 10-11 Juli 1868 rakyat Camba yang dibantu oleh tetangga terdekatnya, Mallawa dan atas dukungan Sulewatang Labuaja bernama La Pagoncing menyerang kantor [pembantu] kontrolir di Camba dan membakar habis kantor seisinya.⁵⁵

Tampaknya kegaduhan politik yang berdampak pada terjadinya konfrontasi terbuka yang melibatkan berbagai pihak terus berlangsung. Pada tanggal 11 Juli 1870 sebuah kontak senjata terjadi lagi yang melibatkan sejumlah orang dari Distrik Camba, Labuaja dan Cenrana. Mereka menyerang Kantor [pembantu] Kontrolir dan menghabisi orang di dalamnya. Seorang polisi bersenjata tewas bersama puluhan orang Camba dan Cenrana lainnya. Penyebab serangan tidak diketahui secara pasti. Namun, kuat dugaan bahwa masalah ini terkait dengan persoalan lama, yaitu meningkatnya tuntutan pemerintah kolonial kepada penguasa lokal untuk mengoptimalkan pemasukan pajak sementara para karaeng makin memperlihatkan ketidaksenangannya terhadap

⁵⁵ ANRI, "Nota van Overgave der Afdeeling ... (1910: 22).

dominasi kolonial. Faktor-faktor ini menjadi pendorong untuk bangkit melakukan perlawanan.

Namun, sekali lagi seperti yang sudah terjadi beberapa waktu sebelumnya, perlawanan bersenjata ini hanya sedikit membuahkan hasil. Bahkan seringkali di antara para tokoh dan pendukung perlawanan menjadi mangsa konflik karena sikap pragmatis yang ditunjukkan oleh sebagian di antaranya yang cenderung bersimpang jalan dengan langkah yang mereka pilih. Namun, letupan dari peristiwa tersebut menyadarkan banyak pihak bahwa rasa dendam dari para tokoh pribumi yang lama terpendam atas keangkuhan sistem politik ciptaan kolonial membuat mereka tampil lebih agresif, melakukan perlawanan dengan beragam cara, strategi, dan kekuatan.

Pada tanggal 22 September 1872 keresahan politik kembali merebak di Camba. Penyebabnya adalah upaya penyisiran yang dilakukan aparat keamanan untuk mencari dan menemukan tiga orang pribumi yang diduga melakukan penyerangan dan membunuh seorang prajurit militer Belanda di Camba. Salah seorang pelaku yang berhasil ditemukan kemudian ditembak mati sementara yang lain melarikan diri. Operasi militer ini menyita perhatian banyak pihak sehingga di bulan Oktober 1872 muncul berita yang menghebohkan di Makassar. Bahwa keadaan di Maros khususnya di Distrik Camba, Cenrana dan Mallawa sangat genting sehingga pasukan bantuan perlu segera dikirim. Gubernur Sulawesi dan Daerah Bawahannya di Makassar akhirnya memberangkatkan dua perwira dan 50 orang prajurit militer untuk membantu aparat yang bertugas menjaga instalasi

militer dan memulihkan kembali situasi keamanan.⁵⁶

Sementara itu, penataan pemerintahan terus berjalan. Distrik Simbang di tahun 1870 digabungkan dengan Turikale. Sudiang bergabung dengan Tello. Tangkuru melalui *besluit* Nomor 31 tanggal 9 Maret 1906 (Lembaran Negara nomor 165) digabungkan dengan Distrik Lau. Beberapa kepala kampung sebelum terjadinya penggabungan ini, bangkit melakukan perlawanan dan harus ditaklukkan dengan kekuatan senjata. Tetapi bagi penduduk saat itu jelas bahwa perlawanan tidak ada manfaatnya dan mereka sendiri harus menanggung akibatnya. Salah seorang tokoh yang paling aktif memprovokasi untuk melakukan perlawanan adalah Matoa Kane-Kane yang bernama Mona Pa Tani. Para pengikutnya hingga tahun 1904 terus menggelorakan perlawanan hingga mereka ditumpas dalam sebuah operasi militer di penghujung tahun itu.⁵⁷

Sementara di beberapa distrik seperti Cenrana, Camba, Bengo, Mallawa, Laiya dan Labuaja masih berada di bawah kontrol yang ketat. Pengawasan yang ketat itu disebabkan oleh kekhawatiran bahwa distrik-distrik tersebut merupakan ancaman terbesar bagi terganggunya keamanan yang menyeluruh di Onderafdeeling Maros. Meskipun Bengo dan Labuaja memiliki status otonom, namun akhirnya keduanya digabungkan dengan Cenrana melalui keputusan (*besluit*) Pemerintah Belanda Nomor 14 tanggal 7 Maret 1868. Pada

⁵⁶ ANRI, "Nota van Overgave der Afdeeling ... (1910: 23).

⁵⁷ ANRI, Lembaran Negara Nomor 31 a tahun 1824; Besluit Nomor 14 tanggal 7 Maret 1868.

24 Januari 1906 ditetapkan bahwa Raya tidak lagi diakui sebagai distrik melainkan sebagai daerah otonom baru yang dipimpin oleh seorang galarang.⁵⁸ Setelah penyerahan Gowa, pada tahun 1908 daerah Gantarang Matinggi digabungkan dengan Onderafdeeling Maros.⁵⁹

Pada tahun 1909 Onderafdeeling Maros berada dibawah Afdeeling Makassar.⁶⁰ Maros kemudian dibagi atas tujuh distrik, yaitu: Turikale, Marusu, Tanralili, Bontoa, Raya, Lau dan Tangkuru. Asisten Residen Maros Klerks saat itu menjalankan pemerintahan langsung atas rakyat. Baru selama dan setelah pemerintahan Inggris, Raja Bone dan rakyatnya terpaksa kembali ke tanah Bone dan karenanya pengaruh sulewatang perlahan-lahan redup, beberapa kepala kampung mengajukan permohonan kepada Asisten Residen Maros untuk ditempatkan di bawah pemerintahan langsung. Sebagai contoh, sebagian orang-orang yang tinggal di Timboro dan Lau mengajukan permohonan untuk menjadi penduduk Turikale dan meletakkan daerah mereka di bawah pimpinan seorang karaeng atau galarang. Akibatnya struktur dan polarisasi antarkampung menjadi lebih rumit sehingga batas-batas administrasi sebuah distrik menjadi tidak jelas. Setiap distrik tidak menunjukkan kesatuan; kampung dari satu distrik sering dikelilingi kampung dari distrik lain.

Dari penghapusan tujuh distrik ini, hanya tiga distrik

⁵⁸ ANRI, *Besluit* No. 10 tanggal 17 Juli 1824 (Staatblad Nomor 31a).

⁵⁹ ANRI, *Besluit* No. 14 tanggal 7 Maret 1868.

⁶⁰ Wilayah yang dahulu berada dalam administrasi pemerintahan Afdeeling Makassar kini meliputi kota/kabupaten; Makassar, Gowa, Maros, Takalar, Jenepono dan Pangkajene dan Kepulauan.

yang dianggap memiliki wilayah yang luas dan penduduknya memadai, yaitu Tanralili, Lau dan Tangkuru. Tetapi empat distrik lain juga tidak terlalu penting baik menyangkut luas wilayah, potensi ekonomi maupun jumlah penduduk.

Para kepala distrik memiliki penghasilan yang sangat kecil sehingga banyak di antara mereka melakukan tindakan penyelewengan untuk mencoba mempertahankan posisi keuangannya. Salah satu strategi yang ditempuh untuk dapat memenuhi kebutuhan ini adalah bahwa kepala distrik tersebut berusaha memilih anggota kerabatnya (biasanya pria dewasa) untuk menjadi kepala kampung. Strategi ini menunjukkan hasil dengan mengarahkan para kepala kampung tersebut agar dapat menyisihkan sebagian hasil panen warganya untuk diberikan kepadanya sebagai bentuk "upeti". Model "ikatan keluarga ini akan mempengaruhi pelaksanaan kekuasaan dalam pemerintahan. Penempatan pimpinan kelompok menyatu *siri'* sebagai penguasa akan melibatkan seluruh anggota kelompok itu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kekuasaan bumiputera cenderung merupakan pemerintahan keluarga".⁶¹

Tindakan ini menimbulkan penolakan di tingkat bawah karena seringkali ditempuh dengan cara paksaan dan para kepala kampung tadi bekerja juga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Beban ini bertambah karena pada saat yang sama masyarakat juga diminta untuk ikut kerja wajib, seperti memperbaiki saluran irigasi, penyediaan

⁶¹ Edward L. Poelingomang. *Perubahan Politik dan ...* (2004: 13-14).

peralatan dan benih pertanian, perbaikan sarana infrastruktur jalan dan lain sebagainya.⁶²

Perubahan struktur kewilayahan juga dilakukan terhadap distrik lama yang dipandang tidak mampu menjalankan birokrasi yang efektif sehingga beban pemerintah Belanda makin banyak. Tambahkan pula bahwa kondisi perkeonomian yang porak poranda mengakibatkan restrukturisasi pemerintahan berjalan cepat. Misalnya, di tahun 1905 Distrik Raya diusulkan oleh Gubernur Sulawesi dan Daerah Bawahannya kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Bogor untuk dihapuskan. Termasuk usulan agar Sulewatang yang sekarang disertai tugas untuk memerintah Distrik Raya, La Hamadea Daeng Matutu, setelah perubahan pemerintahan yang baru akan tetap memimpin daerah tersebut serta usulan penggabungan Distrik Tangkuru ke dalam Distrik Lau.

Dalam catatan arsip-arsip lama yang kini menjadi koleksi ANRI Jakarta peneliti mendapatkan sedikit informasi yang berkaitan dengan pengangkatan penguasa Raya dan kedudukannya dalam struktur pemerintahan Kolonial Belanda di Maros. Bahwa kepala distrik kedua Raya yang sekaligus juga kepala distrik terakhir, yaitu Sulewatang I Usup Daeng Pasau. Ia menjabat sejak tahun 1860-an dan setelah meninggal pada tahun 1893 ia digantikan oleh putranya yang bernama La Tahere Daeng Mapata. La Tahere Daeng

⁶² ANRI, *Besluit* No. 33 tanggal (Buitenzorg), 24 Januari 1906, dan lampiran-lampirannya; Surat Gubernur Celebes dan Sekitarnya No.4407/2 tanggal 31 Oktober 1905, dan Laporan Pejabat Direktur Pemerintahan No. 6 tanggal 15 Januari 1906.

Mapata karena terlibat dalam sindikat kejahatan (antara lain pemerasan terhadap penduduk untuk memperkaya diri sendiri) dan provokasi yang bisa mengancam kekuasaan pemerintah kolonial akhirnya dihukum, dan meninggal di penjara Maros setelah enambelas hari ditahan.⁶³ Jabatan Kepala Distrik Raya akhirnya diserahkan kepada Sulewatang La Hamada Daeng Matutu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi dan Daerah Bawahannya No. 363/41 tanggal 4 Februari 1897.⁶⁴

Ada empat alasan yang dijadikan dasar pertimbangan atas usulan penggabungan tersebut. Pertama, karena Raya dipandang kecil untuk menjadi sebuah distrik sehingga integrasi dengan Turikale akan dapat menciptakan pemerintahan yang efektif. Kedua, upaya segregasi etnisitas antara orang Bugis (dari Bone) yang sejak lama menempati daerah Raya atas izin penguasa setempat dan mendapat perlindungan dari Raja Bone Arung Palakka; ketiga ketidaknyaman orang-orang Bugis hidup di tengah komunitas Makassar sehingga penggabungan ini merupakan upaya terakhir untuk mengintegrasikan orang-orang Bugis yang sesungguhnya ke dalam komunitas mereka. Keempat, penolakan dari Asisten Residen Maros Klerks untuk bergabung dengan Distrik Makassar karena persoalan lama, para rakyat dan bangsawannya sering menunjukkan sikap

⁶³ Pemberhentian La Tahere Daeng Mapata dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi dan Daerah Bawahannya Nomor 5949 tanggal 27 November 1902.

⁶⁴ ANRI, *besluit* No. 363/41 tanggal 4 Februari 1897.

yang kurang bersahabat.⁶⁵ Akhirnya Gubernur Jenderal Hindia Belanda melalui *besluit* No. 33 tanggal 24 Januari 1906, Distrik Raya Onderafdeeling Maros menjadi daerah otonom yang diperintah oleh seorang Galarang.⁶⁶

Sementara penghapusan dan penggabungan Distrik Tangkuru ke dalam Distrik Lau memiliki semangat yang sama dengan penggabungan Distrik Raya, bahwa pemungutan pajak kepala dan pajak penghasilan di Tangkuru lebih sedikit jumlahnya bila dibandingkan dengan tempat lain di Onderafdeeling Maros. Tangkuru memiliki sawah yang subur tetapi paling sedikit hasilnya dan menjadi distrik miskin dengan tingkat kemakmuran terendah karena hampir

⁶⁵ Setelah Perjanjian Bongaya Raja Bone Arung Palakka tinggal di Kampung Bontoala Makassar, dan di Bone sendiri. Kekuasaannya di daerah lain, seperti di Maros diwakili oleh Sulewatang penggantinya. Sebagai akbat dari penguasaan Gowa yang sebelumnya berakhir di daerah ini, sejumlah kampung telah ditinggalkan oleh penduduknya, yang semuanya adalah orang Gowa. Di daerah yang kurang penduduknya ini, oleh Arung Palaka didatangkan orang-orang Bone untuk tinggal di daerah baru ini, yang jumlahnya perlahan-lahan meningkat sehingga daerah itu harus dibagi menjadi tiga Sulewatang, yakni Raya, Lau dan Timboro. Selama dan setelah kekuasaan Inggris, juga supremasi Bone di daerah-daerah ini berakhir. Sebagian besar orang Bone kembali bersama rajanya ke tanah mereka dengan meninggalkan barang-barang yang tidak bergerak, yang semuanya harus disita demi kepentingan pemerintah. Tempat-tempat mereka di kampung-kampung dikosongkan kemudian dikuasai oleh penduduk sekitarnya, hampir semuanya orang Makassar yang berasal dari Gowa. Lihat surat Gubernur Sulawesi dan Daerah Bawahannya yang dikirim kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Bogor tertanggal 31 Oktober 1905 sebagai lampiran pertimbangan atas usulan penghapusan Distrik Riraya; ANRI, *Besluit* No. 33 tanggal 24 Januari 1906 tentang "Penghapusan Distrik Riraya *Onderafdeeling* Maros Menjadi Daerah Otonom".

⁶⁶ ANRI, *Besluit* No. 33 tanggal 24 Januari 1906 tentang "Penghapusan Distrik Riraya *Onderafdeeling* Maros Menjadi Daerah Otonom".

sepanjang tahun harus menghadapi panen yang gagal. Karena itu, penggabungan Distrik Tangkuru ke dalam Distrik Lau yang saling berbatasan itu dapat membantu meningkatkan target pendapatan pemerintah Belanda dari sektor pajak. Dan bahwa Kepala Distrik Lau Salle Daeng Lulu, adalah sosok yang siap untuk mengakhiri pemerintahan buruk yang melanda Distrik Tangkuru.⁶⁷

Penggabungan ini menimbulkan friksi pada level pimpinan distrik karena salah satu di antaranya akan kehilangan jabatan. Namun pemerintah Belanda berhasil meyakinkan Kepala Distrik Lau Salle Daeng Lulu bahwa ia masih diberi tunjangan berupa ganti rugi sebesar f. 400 uang perak/tahun dari keuntungan perjudian, yang menurut resolusi nomor 20 tanggal 6 Maret 1829 menjadi hak penguasa Tangkuru dan penghasilan yang diperoleh dari delapan petak sawah pusaka yang dikelolanya.⁶⁸

Sementara para kepala kampung dan penduduk Tangkuru menolak kondisi baru ini, karena mereka melihat bahwa periode pemerintahan yang buruk telah berlalu dan mereka bisa mengharapkan tindakan cerdas kepala distrik dengan tidak mengorbankan rakyatnya. Penolakan ini diinspirasi oleh sifat kolot dari orang-orang Bugis di Makassar, yang biasanya mencoba untuk melawan dengan sekuat tenaga terhadap setiap perubahan dalam model lama, dan mencoba mengabaikan keputusan yang dibuat di atas

⁶⁷ ANRI, *Besluit* No. 33 tanggal 24 Januari 1906” .

⁶⁸ ANRI, *Besluit* Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 31 tanggal 9 Maret 1906.

dan tidak mematuhi perintah pejabat kepala distrik yang baru. Kondisi ini tidak lama bertahan dan pada akhirnya semua elemen masyarakat menerima penggabungan tersebut sebagai sebuah langkah baru untuk mewujudkan perubahan positif menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan efisien.

Di Distrik Cenrana, Ponga Daeng Maranu istri bekas Kepala Distrik yang mengundurkan diri di tahun 1909 yang bernama Palawa Gau, masih berusaha mempertahankan pengaruhnya selama pemerintahan suaminya. Sementara putra sulungnya Pasamu tidak bisa diandalkan untuk menjadi calon pemimpin. Dalam sebuah laporan yang terbit ditahun 1910 disebutkan bahwa Pasamu sering terlibat dalam aksi-aksi perampokan dan pencurian.⁶⁹

Aksi-aksi semacam ini tidak hanya terjadi pada keluarga karaeng yang tidak menjabat lagi namun biasa pula dilakukan oleh mereka yang masih menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam hirarki pemerintahan tradisional. Pengawasan ketat yang dipraktekkan oleh sistem birokrasi kolonial membuat orang-orang pribumi yang bergantung kepadanya terpaksa memilih dan menempuh cara-cara yang tidak lazim untuk memenuhi ambisi mereka memiliki sesuatu yang lebih dari yang seharusnya diperoleh. Kepala Distrik Marusu Daeng Marangi, misalnya pada tahun 1890 harus dipecat dari jabatannya karena tindakan pemerasan dalam proses penyelesaian sengketa tanah (sawah) di wilayahnya.⁷⁰

⁶⁹ ANRI, "Nota van Overgave der Afdeeling ... (1910: 25).

⁷⁰ ANRI, "Nota van Overgave der Afdeeling ... (1910: 25).



Bab III

WARISAN ADAT DAN POLITIK REPRESENTASI KARAENG



A. Pola Penguasaan dan Kepemilikan Tanah

Ada tiga hal yang ingin dibahas dalam konteks penguasaan dan kepemilikan tanah oleh para karaeng selaku penguasa lokal di Onderafdeeling Maros. Ketiga hal tersebut adalah menyangkut cara perolehan tanah dan hak-hak yang melekat di atasnya, formasi ikatan adat yang memperteguh pola penguasaan dan kepemilikannya, dan hak-hak alami pribadi/kelompok keluarga karaeng terhadap tanah adat.

Di Onderafdeeling Maros hingga tahun 1926 terdapat beberapa jenis peruntukkan tanah yang menurut kebiasaan setempat dibagi atas tiga bagian, yaitu “tanah *palata*”, “tanah *aloe*”, dan “tanah *rappe* atau tanah *gusung*”. Tanah *Palata* adalah tanah yang menjadi tempat penampungan air pada musim hujan di setiap sungai. Di musim kemarau, air yang ada di tanah *palata* debitnya kecil sehingga hanya cukup digunakan untuk menyiram tanaman tembakau dan sayuran. Tanah yang terletak di dataran tinggi sungai yang airnya selalu tersedia yang membentuk delta atau danau tidak

dimasukkan sebagai tanah *palata*.¹ Selain tanah *palata* terdapat juga tanah *aloe*, tanah *rappe* atau tanah *gusung*. Semua itu merupakan pulau, timbunan pasir atau lumpur yang berada di tengah sungai, yang memiliki luas yang cukup untuk ditanami dengan berbagai jenis tanaman hortikultura.

Tanah *aloe* maupun tanah *gusung*, merupakan milik masyarakat adat. Hak kepemilikan tersebut menurut tradisi, merupakan warisan dari Sang Pencipta. Karena itu, maka tanah-tanah tersebut bisa menjelma atau diperlakukan sebagai *gaukang* yang berfungsi sebagai obyek ritual dan lokus identitas *paqrasangang*² bagi masyarakat adat. *Gaukang* merupakan barang titipan Tuhan kepada karaeng selaku pemimpin masyarakat adat, dan karena itu atas perintah Sang Pencipta maka karaeng memiliki kewajiban untuk menjaga dan memeliharanya. Tanah-tanah tersebut harus dimanfaatkan dengan memberikan kepada penduduk setempat untuk digarap dengan sistem bagi hasil (*thesang*) atau pungutan lain yang sangat bergantung pada kebutuhan karaeng.

Orang Makassar dan Bugis menyebutkan bahwa *gaukang* yang dianggap seperti dewa memiliki sifat dan kebutuhan terutama yang berkaitan dengan pertanian seperti sawah, air, bajak atau yang berhubungan dengan peralatan perang seperti; pedang, perisai, tombak, dan keris. *Gaukang* yang asli pada umumnya telah hilang atau lenyap, dan hanya sebagian kecil saja yang masih tersisa. Dalam ikatan adat

¹ ANRI, *Memorie van Overgave van de Controleur Onderafdeeling Maros, 16 Maret 1926*. Reel No. 32 MvO Serie 1 e (1926: 2).

² *Paqrasangang* (mks) merupakan sebuah lokasi pemukiman ataaau kampung yang dijaga kesuciannya oleh komunitas adat dalam sebuah kerajaan.

Tanralili misalnya, sawah, bajak, sepotong besi dan tonggak kayu yang dicat dianggap sebagai *gaukang* atau *arajang*. Di Distrik Raya dan Marusu, bajak dan alat pertanian yang lain masih merupakan asesoris penting yang selalu dijaga dan dipelihara dengan segala atribut “kesucian” dan bahkan “kekeramatan” yang melekat di dalamnya.

Di Tanralili sistem bagi hasil atau pungutan lain selalu terjadi. Ketika pada tahun 1916 Karaeng Tanralili Poenroe Daeng Mangati dibuang, maka wakil pemerintah Belanda yang ditempatkan dalam ikatan adat memungut *susung palatta* untuk kepentingan kas onderafdeeling. Bersamaan dengan itu, semua pungutan yang dianggap sewenang-wenang yang dilakukan oleh kepala kampung dihilangkan. Sebagai pengganti, pemerintah Belanda menetapkan pajak 10 % dari hasil bumi yang diperoleh yang wajib disetorkan. Dari hasil pajak ini, Distrik Tanralili dapat menyumbang antara f. 250 hingga f. 500 setiap tahun untuk kas pemerintah.³ Kondisi yang berbeda ditemukan di Simbang, di mana tanah *palatta* yang terletak di sepanjang aliran sungai besar, yang juga menyediakan tanah bagi Turikale, Lau dan Marusu sedikit memberikan kontribusi.

Bekas Kepala Distrik Turikale mendapatkan penghasilan yang tinggi dari tanah pusaka dan pendapatan adat lain, seperti juga dilakukan oleh Pake Daeng Masiga, tidak menuntut pungutan, membiarkannya hilang sehingga selama bertahun-tahun tidak ada *susung palatta* yang dihasilkan. Ketika Simbang

³ ANRI, *Memorie van Overgave ...* (1926: 6).

pada tahun 1923 dipisahkan dari Turikale, dan pemerintahan adat Simbang mulai memperoleh perhatian, maka pungutan *susung palatta* kembali menjadi masalah.

Meskipun pemerintah Belanda campur tangan dalam urusan adat di Turikale namun para karaeng bergeming dengan tidak memungut *susung palatta* yang melebihi kemampuan rakyatnya. Akibatnya, target perolehan pajak tidak terpenuhi. Tetapi karaeng memperoleh penghasilan dari pungutan lain yang jumlahnya tidak besar dengan tujuan untuk membuktikan kuatnya ikatan adat. Setiap tahun tanah *palatta* dikerjakan dengan sistem sewa, yang pembagian hasilnya tidak melebihi 10 % untuk penggarap. Dengan sistem ini, maka tidak ada lagi hak pakai individu secara turun temurun. Pemerintah Belanda menerapkan cara-cara modern dalam pengelolaan tanah-tanah adat dengan mengizinkan kepada penawar tertinggi untuk mengerjakannya selama satu musim.⁴ Di Simbang, Turikale dan Marusu seringkali sewa tahunan diberikan kepada orang yang sama.

Sejak pemerintah Belanda melakukan penetrasi kekuasaan terhadap adat, maka ikatan adat antarkaum menjadi longgar tetapi ketaatan terhadap karaeng masih dipertahankan. Sebelumnya, penggunaan tanah *palatta* masih dapat dikerjakan secara turun temurun dari ikatan keluarga yang sama, namun setelah itu diatur secara ketat melalui mekanisme persewaan dengan memenuhi kewajiban keuangan yang dibebankan oleh ikatan adat kepadanya. Jika

4 ANRI, *Memorie van Overgave ...* (1926: 9).

susung palatta sebagian kecil darinya dibayar dalam uang sewa, maka setiap orang perlu mengakui hak pakai atas tanah itu. Dalam pandangan kolonial bahwa ikatan adat sering melakukan pelanggaran terhadap sistem sewa, karena itu maka diperlukan pengaturan.⁵ Sementara para karaeng selalu memperhatikan bahwa setiap orang harus tetap memiliki mata pencahariannya.

Tanaman yang tumbuh secara liar oleh masyarakat dianggap sebagai titipan Tuhan dan dengan sendirinya menjadi milik *gaukang*. Tanaman nipah dan lontar misalnya, yang muncul di dalam hutan tidak ditanam oleh siapapun, tidak dirawat oleh siapapun sejak awal, menjadi milik *gaukang*. Jika sebuah pohon lontar menjadi besar sehingga memungkinkan penyadapan aren, maka diduga bahwa mereka yang meletakkan tangan di pohon tersebut, memasang tangga dan melakukan penyadapan, memiliki hak pakai mutlak atas pohon itu. Juga tampak bahwa ketika pohon masih muda, orang memberitahukan bahwa mereka akan memanfaatkannya. Hanya pemberitahuan ini saja cukup untuk menegaskan hak pakai. Sebuah pohon yang tumbuh di antara pohon lain, yang telah digunakan oleh orang tertentu, tidak pernah disadap oleh orang lain, karena orang pertama yang memiliki hak pakai terhadapnya.⁶

Para karaeng dalam ikatan adatnya masing-masing tidak mengatur secara khusus mengenai hal ini. Hanya secara umum dipercaya bahwa semua pohon aren adalah

⁵ ANRI, *Memorie van Overgave ...* (1926: 10).

⁶ ANRI, *Memorie van Overgave ...* (1926: 10-11).

akkarungang. Para pembuat gula aren (*kasuwiyang gola*) di hutan (*romang*) sering memberikan sejumlah potongan gula merah kepada *karaeng*. Pemberian ini tidak dipandang sebagai kewajiban adat, meski menurut tradisi bahwa kepada para *karaeng*lah *gaukang* itu dititipkan oleh Sang Pencipta untuk dipelihara dan dikelola bersama rakyat. Hal ini lebih dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap *karaeng* selaku tokoh masyarakat.

Menyangkut proses penguasaan dan kepemilikan tanah di *Onderafdeeling Maros* pertama yang harus ditelisik adalah kontestasi kekuasaan antardua kerajaan yang memiliki pengaruh kuat atas daerah ini, yaitu Gowa dan Bone. Sejak Kerajaan Bone menggusur pengaruh Gowa atas Maros pasca Perjanjian Bungaya tahun 1667, Raja Bone Arung Palakka bertahun-tahun menguasai daerah Maros sampai Mandale. Penduduk asli Makassar yang lebih dahulu bermukim di sana ditindas, sebagian diusir dan dikembalikan ke tanah Gowa. Setelah tindakan pengusiran ini terjadi dan diketahui VOC, maka pasukan Bone segera dipukul mundur. Selama beberapa saat, sebagian orang Bone tetap dibiarkan tinggal sehingga di beberapa daerah ditemukan penduduk campuran Makassar dan Bugis.

Ketika orang-orang Bone setelah dikalahkan menarik diri, terbunuh dan sisanya menguasai bagian yang tidak lagi termasuk wilayah Bone, sejumlah tanah sawah menjadi terbengkalai. Penduduk asli Makassar sebagian besar tidak ada lagi, juga sebagian pendatang dari Bone telah pergi sehingga VOC bebas mengatur daerah ini. VOC mulai mengatur

sistem sewa tanah dan mencoba melepaskan hak kepemilikan pribadi atas sejumlah tanah sawah yang telah digarap. Upaya ini ditentang oleh para karaeng karena mereka berpandangan bahwa kalau hak-hak individu dihilangkan maka loyalitas rakyat kepada pemimpinnya akan menurun yang berdampak pada berkurangnya tenaga kerja untuk menggarap sawah-sawah tersebut. VOC memahami keberatan para karaeng dan akhirnya mengizinkan setiap orang yang sudah menguasai tanah-tanah tersebut untuk tetap digarap tetapi diwajibkan kepada mereka untuk melakukan kerja wajib tambahan baik untuk karaengnya maupun untuk kepentingan VOC. Persyaratan ini ditambah pula dengan klausul bahwa VOC menjadi pemilik sementara penggarap tanah *kasuwiyang* menjadi pemakai.

B. Galung Arajang dan Kontestasi Kekuasaan Para Karaeng

Galung arajang (sawah pusaka) dipandang memiliki kekuatan adikodrati yang dapat menghembuskan aura kehidupan dan berfungsi sebagai jembatan penghubung antara manusia dengan Sang Khalik. Kekuatan yang terpancar dari sikap dan kewibawaan sang penyimpan/perawat *arajang* yang tak lain adalah para karaeng dan atau arung sebagai pewaris. Para karaeng menikmati hasil dari sawah pusaka ini, setelah sebagian kecil hasilnya dipersembahkan untuk *arajang*. Sawah ini yang oleh orang Bugis disebut *galung arajang* atau *galung kalompoang* (Makassar) merupakan sebuah objek yang dipertahankan untuk memenuhi kebutuhan karaeng atau arung sebagai pemimpin adat. Sawah pusaka bersama

perlengkapannya menunjukkan bahwa bukan hanya *galung arajang* tetapi juga ditambahkan *galung akarungang*. *Galung arajang* terletak di lokasi yang menguntungkan dalam ikatan adat, membentuk suatu kompleks seperti sawah Toranu di Marusu. *Arajang* tidak bisa dibagi begitu juga dengan sawahnya.⁷

Galung akarungang adalah sawah yang dibuat dalam kerja wajib, demi kepentingan mereka yang menjadi kepala masyarakat adat, *sulewatang*, *pabicara* atau kepala kampung. *Sulewatang* muncul dalam setiap keluarga karaeng yang memerlukan biaya besar sehingga mereka membuat *galung akarungang* untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak. Dalam perkembangan kemudian *galung akarungang* ini statusnya berubah secara perlahan-lahan, seolah menjadi sawah pusaka yang hanya dapat dikuasai secara personal oleh keluarga karaeng. *Sulewatang* yang bekerja keras untuk tuannya (karaeng) juga memerlukan *galung kianreang* (sawah untuk kebutuhan hidup), dan juga harus dibuat dalam kerja wajib. Di Marusu, terdapat *galung kasulewatangan* di Batu Malipue, di Tanralili juga terdapat *galung kasulewatangan* yang diperoleh lewat penaklukkan Anakaraeng Tanralili, dan *galung akarungang* untuk kepentingan *pabbicara* yang akhirnya dijadikan sebagai sawah pusaka. Hal yang sama terjadi pula di Distrik Lau.

Perubahan status kepemilikan lahan *thesang* menjadi tanah jabatan terjadi melalui proses “modernisasi” ikatan

⁷ ANRI, *Memorie van Overgave ...* (1926: 22).

hukum pribumi yang berlangsung diakhir tahun 1923. Konversi tanah-tanah pemerintah menjadi *galung thesang* atau *galung kasuwiyang* menjadi *galung akarungang* dilakukan untuk memenuhi tuntutan kenaikan gaji para karaeng yang berkuasa yang setiap tahun makin tinggi, yaitu 1/5 dari hasil tanah yang diperoleh setiap masa panen.

Akibat tuntutan tersebut maka pemerintah Belanda mengubahnya menjadi *galung akarungang* seperti yang terjadi di Galarang Appaka, Tanralili, Marusu, Turikale, Lau, Simbang, dan Bontoa. Dari konversi kepemilikan tersebut maka penghasilan rata-rata kepala kampung berubah drastis dari f.10 ditahun 1922 menjadi f.120 ditahun 1923 atau setara dengan 150 ikat padi (seberat 24 katti, dihitung f.0,80 per ikat). Pendapatan bersih yang diperoleh kepala kampung sebagai gaji pokok adalah 400 ikat; di mana $\frac{1}{4}$ di antaranya disisihkan untuk upah potong, sisanya (setengah dari 300 ikat), yaitu 150 ikat (setara dengan f.120) diberikan kepada penggarap *thesang*. Di Turikale dan Marusu gaji pokok yang diterima oleh kepala kampung adalah 80 dan 150 ikat padi.⁸

Selain sawah *akarungang* yang sangat penting ini, ikatan adat Simbang masih mengenal *galung akarungang* di Campa-Campa dan Tanetea. Selanjutnya *galung akarungang* menjadi *galung suro* di Kasai (Turikale), yang hasilnya diperlukan untuk membayar upah kerja *suro*, yaitu "utusan" yang semula berasal dari Asisten Residen Maros dan kemudian Kepala Distrik Turikale. Sejak tahun 1913 *galung suro* telah

⁸ ANRI, *Memorie van Overgave ...* (1926: 26).

dihapuskan sehingga sawahnya harus dikembalikan kepada masyarakat adat. Namun, hal ini diabaikan sehingga para penggarapnya tanpa melakukan tambahan pekerjaan, segera menggarap sawah-sawah itu. Pada tahun 1924 persoalan ini diatur, kepada penggarapnya diberikan sawah untuk dikerjakan, asalkan mereka membayar f. 0,05/ikat sebagai uang kerja borongan, yang hasilnya setiap tahun bisa mencapai f.700.⁹

Sawah *penati*, *paranung* dan *sariang*, tersebar di mana-mana yang kesemuanya merupakan *galung arungang* dan diubah menjadi tanah jabatan milik kepala kampung yang tidak mendapatkan gaji. Pada tahun 1925-1926 tanah jabatan ini digarap dengan kerja komunal bagi kepala kampung yang kebanyakan tidak lagi menikmati tanah jabatan, sementara kas terlalu kecil untuk membayar gaji para kepala ini dalam bentuk uang.¹⁰

Gaji para kepala kampung di Lebbotengae tidak diatur secara rinci oleh ikatan adat maupun oleh pemerintah Belanda. Hal ini disebabkan oleh kekurangan tanah dan banyaknya hambatan yang dihadapi sehingga kepala kampung tidak digaji secara layak. Ikatan adat dari Federasi Lebbotengae dengan demikian merupakan satu-satunya yang tidak memiliki aturan gaji bagi para kepala kampung.

Para kepala kampung ini dapat dibagi atas dua kategori, yakni mereka yang menerima jabatan sebelum peraturan gaji prinsip diterapkan, dan mereka yang setelah itu menjadi

⁹ ANRI, *Memorie van Overgave ...* (1926: 27).

¹⁰ ANRI, *Memorie van Overgave ...* (1926: 28).

kepala kampung. Mengenai jenis pertama lebih daripada f 120/tahun yang diterima sebagai tunjangan pribadi dan jika tidak lagi menjabat, maka tunjangan pribadi akan lenyap. Jadi uang itu akan disetorkan ke kas adat, karena sawah yang menghasilkan lebih dari 400 ikatan, diborongkan.

Yang dimaksudkan dengan hak atas *ongko* pada umumnya di daerah tertentu adalah tidak seorangpun boleh masuk, mengokupasi, mengeksploitasi, tanpa ijin sebelumnya dari kepala masyarakat adat. Sebagai *ongko* khususnya orang mengetahui *ongko jenga* atau lahan perburuan rusa, di mana tidak seorangpun yang boleh berburu kecuali raja, atau bila orang hanya bisa berburu dengan persetujuan raja sebelumnya.

Selanjutnya orang mengenal *ongko-ala*, yakni *ongko* yang hanya terdiri atas hutan rimba, di mana tidak ada produk yang bisa diambil tanpa persetujuan sebelumnya. *Ongko-ala* dikenal oleh setiap ikatan adat yang memiliki hutan. *Ongko* kecil adalah *ongko-kemiri* di Cenrana dan Camba, *ongko kaluku* di Lau yang hasilnya tidak disetor kepada kas adat. Terdapat pula *ongko tamparang*, yaitu sebidang tanah sepanjang pantai yang bisa digunakan sebagai batas darat, sampai tempat di mana perahu tidak bisa berlabuh. Setiap ikatan adat memiliki hak kepemilikan atas tanah dan air dari garis pantai sampai tempat perahu tidak lagi bisa berlabuh.¹¹

Hak *kamisi* merupakan hukum adat yang sudah sangat tua, berasal dari kebiasaan perawatan *arajang* animisme,

¹¹ ANRI, *Memorie van Overgave ...* (1926: 32).

yang perlu mengadakan sesaji khusus setiap hari Jumat, seperti umat Islam, termasuk juga hak untuk menangkap ikan. Karaeng menuntut semua ikan dari sero pada hari Kamis sebelumnya dan contoh terbaik adalah *arajang* dipersembahkan lewat *penati* karaeng. Kemudian ketika ini lenyap, *arajang* hanya bisa memanfaatkan sisa hak itu.¹² Kebiasaan untuk menyetorkan semua ikan dari sero kepada karaeng tiap hari Kamis ini sekarang tidak ada lagi. Dahulu di masyarakat adat Lau hak itu diborongkan oleh karaeng yang memiliki kolam ikan kepada masyarakat adatnya.¹³

C. Krisis Ekonomi dan Politik dan Upaya Pemecahannya

Pada tahun 1891 Gubernur Van Braam Morris menunjuk angka fluktuasi produksi padi di distrik utara (Maros, Pangkajene, Sigeri dan wilayah sekitarnya) selama periode 1881-1890 berkisar antara 5.173.018 sampai 2.536.753 ikat (satu ikat setara dengan 12-13 kati). Dalam kondisi seperti ini Braam Morris mengusulkan untuk melakukan perbaikan melalui penggalian saluran air sederhana oleh penduduk. Afdeeling Maros sebagai lumbung padi Sulawesi Selatan dan penduduknya menyetorkan 1/10 hasilnya kepada pemerintah Belanda terus didorong agar dapat menyelesaikan krisis yang dihadapinya terutama, yang pertama-tama adalah perbaikan sistem irigasi yang ada.

Untuk menjamin bahwa saluran irigasi berfungsi baik,

¹² ANRI, *Memorie van Overgave ...* (1926: 32).

¹³ Wawancara dengan Andi Abdul Waris Tadjuddin Karaeng Sioja, Balla Lompoa Kasikebbo-Maros 26 Juli 2015.

Braam Morris memandang perlu untuk mengangkat seorang pengawas pengairan yang cocok bagi daerah ini. Dua tahun kemudian, pada bulan Juni 1893 Direktur Dinas Pekerjaan Umum menunjuk Insinyur Ilcken yang akan bertugas selama lima bulan untuk membantu gubernur memberikan informasi teknis dalam pembukaan proyek pengairan di distrik utara ini. Ilcken menemukan bahwa di Maros hanya air terjun Bantimurung yang bisa dimanfaatkan untuk mengairi bentangan sawah yang luas.¹⁴

Setelah dilakukan kajian yang mendalam terhadap rencana pembangunan irigasi Bantimurung maka diputuskan bahwa alokasi biaya yang harus dipersiapkan untuk membangun bendungan, memperhatikan pasokan air, membuat saluran distribusi air dan pekerjaan fisik yang lain direncanakan sebesar f.13.445 dengan masa pengerjaan sekitar 190.330 hari bagi pekerja wajib.¹⁵ Apabila irigasi Bantimurung ini berfungsi optimal, maka produksi pertanian dapat ditingkatkan dari 11,3 pikul padi kering per bahu dan tanah sawah *thesang* yang hanya menghasilkan 8 pikul maksimal¹⁶ akan naik menjadi dua kali lipat dari keadaan sebelumnya.

Untuk meningkatkan arus pergerakan barang dan

¹⁴ PNRI, "De regeling der heerendiensten in Zuid Celebes", dalam *Soerabaja Handelsblad*, tanggal 7 Oktober 1905, lembar ke-2.

¹⁵ PNRI, "De Week" dalam *Soerabajasch Handelsblad*, tanggal 9 September 1905, lembar ke-2. Kerja wajib untuk sektor irigasi mencakup perbaikan parit dan saluran air. Ada pula kerja tanpa upah meliputi pembukaan dan perawatan jalan, jembatan dan saluran air. Setiap orang dewasa, dengan persyaratan tertentu, harus melaksanakan tugasnya sebagai pekerja wajib antara 36 hingga 42 hari dalam setahun.

¹⁶ PNRI, "De Week" dalam *Soerabajasch ...* 9 September 1905.

jasa, seorang pejabat Belanda W.H. Smith, mengajukan permohonan perpanjangan masa dinas selama enam bulan (Oktober 1900-Maret 1901) kepada Gubernur Sulawesi dan Daerah Bawahannya Braam Morris. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan rencananya agar dapat memperoleh ijin mengoperasikan kapal uap dengan rute pelayaran yang membentang mulai dari Segeri melalui Pangkajene, Maros, dan Parangloe ke Tallo.¹⁷ Selain rencana untuk meningkatkan akses transportasi laut, perusahaan-perusahaan Belanda yang beroperasi di Jawa dan Sulawesi juga berusaha membuka jalur transportasi darat yang menghubungkan berbagai kota di Sulawesi Selatan. Hingga tahun 1900 terdapat beberapa proposal permohonan untuk membuka jalur trem yang akan melintas melalui Tallo-Makassar-Bantaeng, Segeri-Pangkajene-Maros-Parangloe-Tallo, dan Menado-Maumbi-Kema.¹⁸

Namun, permohonan tersebut ditolak oleh pemerintah Belanda karena sebagian besar pemohon mengulang usulan sebelumnya yang kerap melampirkan berkas yang tidak lengkap, dan yang lain mengharapkan prioritas pengerjaan yang tidak sesuai rencana (*master plan*) yang sudah dibuat, termasuk belum dilakukannya pengukuran lahan sesuai kebutuhan pembangunan.¹⁹

Upaya pemulihan kondisi sosial dan ekonomi dilakukan pula, antara lain melalui pengembangan sistem pendidikan dengan mendirikan *schakelschool*, perbaikan sarana

¹⁷ PNRI, "Uit Buitenzorg" dalam *De Locomotief*, tanggal 16 Oktober 1900, lembar ke-2.

¹⁸

¹⁹ PNRI, "Uit Buitenzorg" dalam *De Locomotief*... (16 Oktober 1900).

infrastruktur jalan, dan jasa layanan penerangan listrik yang menghubungkan antara Makassar dengan Maros hingga kawasan air terjun Bantimurung. Untuk merealisasikan rencana tersebut pada akhir tahun 1900 pemerintah Belanda memberikan izin kepada kontraktor J.J. Luyten untuk memulai pekerjaan. Ijin yang diberikan untuk mengelola jaringan listrik berlaku selama 40 tahun baik di Makassar maupun di Maros.²⁰ Rencana peningkatan sarana infrastruktur perhubungan juga dilakukan dengan memperbaiki jembatan Butatua dan Tamalen di jalan poros yang menghubungkan Makassar-Maros dengan biaya masing-masing sebesar f.3308 dan f.1416.²¹

Untuk melihat kemajuan pekerjaan dari sejumlah proyek yang sudah direncanakan pemerintah Belanda menugaskan H. van Kol melakukan observasi lapangan di seluruh wilayah yang sudah dipersiapkan. Dengan menumpang sebuah kapal uap dari Batavia ke Makassar lewat Surabaya, van Kol akhirnya tiba di Makassar pada tanggal 20 Mei 1902. Ia memulai perjalanannya ke Distrik Tanralili sehari setelah itu dengan ditemani oleh seseorang yang sangat mengenal daerah ini. Van Kol mengamati kondisi real di lapangan untuk membuktikan informasi yang diterimanya tentang kekeringan dan kesulitan ekonomi yang dihadapi penduduk yang tinggal di Onderafdeeling Maros. Laporan hasil kunjungannya tersebut dituangkan dalam sebuah laporan

²⁰ PNRI, *Harian De Locomotief*, tanggal 23 Oktober 1900, lembar ke-2.

²¹ PNRI, "Gouvernement beschikking" dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, tanggal 24 Oktober 1902, lembar ke-2.

pendek yang penulis ringkaskan berikut ini.

“Di sepanjang jalan yang tandus akibat kekeringan yang melanda van Kol menemukan pohon-pohon liar yang tumbuh meronta, rerumputan yang tidak pernah dimakan oleh hewan. Jalan yang ditempuh harus melewati akar-akar pohon bakau, yang membentuk suatu naungan yang menutup kepala. Rumah-rumah telah roboh dan ditinggal pergi oleh pemiliknya karena wabah kolera yang menimpa. Beberapa rumah yang tampak hidup dengan konstruksi atap *sambulayang* atau tangga miring yang merupakan tempat tinggal kaum bangsawan, tetapi selain itu juga ada rumah yang tampak miskin penampilannya seperti milik Kepala Distrik. Beberapa orang pria berjalan dengan langkah gontai, menyampirkan sarung di pundaknya, yang lain mengikatkannya pada pinggul sebagai bentuk hormat. Orang-orang Bugis mengenakan ikat pinggang dengan keris dan hampir semuanya memegang tombak di tangan. Lahan yang terletak di sebelah selatan Maros ini mencakup jenis tanah lempung yang pada musim hujan sangat menderita karena banjir, dan di musim kemarau kekurangan air. Di sekelilingnya menyisakan pemandangan lahan persawahan yang gersang”.²²

Dalam perjalanan ke Marusu, tampak sungai yang lebar, mempunyai debit air yang besar (curah hujan pada tahun 1900-1902 mencapai 3.161 mm, tetapi tidak

²² PNRI, H. van Kol, “De dreigende voiding schaarschte te Maros”, dalam *Soerabajasch Handelsblad*, tanggal 14 Juni 1902, lembar ke-2.

teratur. Pada bulan Juni hingga September curah hujan hanya 228 mm, dan pada bulan November berkisar antara 26 hingga 12 mm). Saluran air dari Bantimurung mampu mengairi areal persawahan seluas 8.400. Kini [tahun 1902] di dekat Maros tidak ada air lagi yang mengalir karena kerusakan saluran irigasi.²³

Sejauh mata memandang, setiap tanaman padi gagal, hanya sebagian sawah-sawah yang dijumpai masih menghasilkan panen meskipun hasilnya buruk. Biasanya pekerjaan ini menuntut keterlibatan ribuan petani dengan tanpa menyediakan bahan pangan bagi mereka. Kini kelaparan dan penderitaan telah menunggu di depan mata dan penyakit belum pergi. Penduduk Kampung Bontosongo terancam kelaparan karena gagal panen. Di sini terdapat sebuah bendungan besar yang dibangun di tempat yang tidak sesuai sehingga tidak berfungsi. Beberapa orang mencangkul tanaman ubi yang mereka tanam di dalam hutan. Kaum wanita tampaknya termasuk dalam suatu sekte yang dipimpin seorang haji, melaksanakan ritual dzikir dan dikenal karena kefanatikannya. Tetapi lahan tetap tidak memberikan panen, lumbung tidak menyimpan makanan, kemiskinan tetap melanda.²⁴

Laporan van Kol telah mendorong pemerintah Belanda

²³ PNRI, "De dreigende voiding ... (1902: lembar ke-2); PNRI, "De Week" dalam *Soerabajasch Handelsblad*, tanggal 9 September 1905, lembar ke-2.

²⁴ PNRI, H. van Kol, "De dreigende voiding..."

untuk melakukan perbaikan sistem dan perubahan kebijakan terhadap daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Perubahan orientasi ini disebabkan oleh semakin menguatnya tuntutan dari para tokoh lokal yang kemudian direspon orang-orang Belanda terpelajar, terutama yang sedang berada dalam lingkaran kekuasaan. Maros dan wilayah sekitarnya yang sedang dilanda kekeringan dan paceklik yang mengancam kehidupan masyarakatnya merupakan daerah pertanian yang mempunyai kontribusi besar dalam memasok kebutuhan pangan. Maros juga merupakan daerah pertanian (khususnya padi) dan perikanan, dua komoditi penting yang dihasilkan daerah ini, selain industri perkebunan tebu yang direncanakan kemudian oleh pemerintah Belanda.

Melihat kondisi kekeringan dan ancaman kelaparan yang datang akhirnya pemerintah Belanda memberikan bantuan kemanusiaan untuk Onderafdeeling Maros sebesar f 40.000. Bantuan tahap kedua segera mengalir yang besarnya f. 60.000.²⁵ H. Van Kol mengeritik bantuan tersebut sebagai “pencitraan politik semata. Pemerintah Belanda kurang bertanggungjawab dan seperti kehilangan sensitivitasnya atas penderitaan rakyat, serta keacuhan untuk tidak berbuat maksimal terhadap bidang irigasi”.²⁶

Tiga tahun setelah artikel van Kol dipublikasikan (1905), muncul perdebatan di antara para pejabat Belanda dengan mengeluarkan berbagai gagasan dan argumen untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi penduduk jajahan.

²⁵ PNRI, “De Week” dalam *Soerabajasch Handelsblad*,...

²⁶ PNRI, “De Week” dalam *Soerabajasch Handelsblad*,...

Misalnya, anjuran agar segera menyelesaikan kendala-kendala teknis yang mengganggu pelaksanaan proyek irigasi Bantimurung, seperti berulang kali disuarakan Gubernur Sulawesi dan Daerah Bawahannya Braam Morris. Tetapi tidak sedikit pula yang berapologi, seolah membiarkan situasi itu berlanjut dengan berbagai alasan. Hal ini terutama datang dari aparat pemerintah Belanda sendiri seperti M. Van Geuns yang mengusulkan agar memperbaiki instrumen peraturan perundangan yang berlaku lebih dahulu sebagai pijakan, sebelum pekerjaan irigasi dimulai.²⁷

Sebagian yang mengeritik kebijakan pemerintah Belanda menyesalkan bahwa lahan persawahan Maros belum dialiri, tetapi mereka tidak mempunyai keberanian untuk menyalahkan pemerintah Hindia Belanda selama berada di Pulau Jawa yang berpenduduk jauh lebih padat dan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan di Sulawesi dan sekitarnya. Selanjutnya mereka menyesalkan pula bahwa penduduk di Sulawesi belum memiliki kepastian hukum.²⁸

Pada tahun 1920 distrik utara dan wilayah sekitarnya seperti Makassar dan Takalar mendapat perhatian yang cukup besar untuk mengembangkan jalur transportasi darat. Daerah ini semakin banyak mendapatkan prioritas dari pemerintah Belanda dan perusahaan perdagangan, perkebunan dan

²⁷ Perdebatan tersebut muncul dalam berbagai perspektif dan media massa meliputi dengan analisis yang tajam. Lihat, misalnya artikel yang ditulis oleh M. Van Geuns; "De Week" dalam *Soerabajasch Handelsblad*, edisi tanggal 9 September 1905.

²⁸ PNRI, "Maccasarsche belangen" dalam *Soerabajasch Handelsblad*, tanggal 29 September 1902, lembar ke-2.

industri swasta. Pertama-tama yang menarik perhatian adalah wilayah Sulawesi bagian barat daya, terutama Makassar, khususnya di dataran Gowa dan Maros serta daerah di sekitar Danau Tempe, Sidenreng dan Sengkang.²⁹

Dengan perkembangan daerah ini yang makin pesat, jaringan jalan segera meluas. Jalan lalu-lintas darat dalam skala besar mulai dibuka pada tanggal 19 Juli 1920 yang ditandai dengan penancapan cangkul di tanah untuk membuka jalan kereta api Makassar-Takalar-Maros sepanjang 72 kilometer dengan biaya sekitar f. 3.000.000. Pelaksana dari proyek ini adalah perusahaan NV. Volker and Houdijk.³⁰ Jalur Makassar-Takalar-Maros kemungkinan akan diperpanjang melalui daerah yang secara ekonomi cukup potensial atau yang memiliki masa depan yang baik.³¹ Orang berharap bisa menemukan sarana pengangkutan yang lebih cepat dan lebih besar terutama karena inilah jalur kereta api pertama di Sulawesi.³²

Bila jalur pertama ini berjalan sukses, maka akan dibuka kemungkinan jalur kedua, dari Maros melalui Segeri-Pangkajene-Tanette, melalui Soppeng menuju Sengkang sepanjang 150 km, yang biayanya ditaksir sekitar f 10.000. Jalur ini membentang melalui dataran Gowa dan Maros yang subur dan berpenduduk padat, yang berturut-turut

²⁹ PNRI, "Spoorwegen in Zuid Celebes" dalam *Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, tanggal 16 September 1920, lembar ke-2.

³⁰ PNRI, "De ijzeren baan op Celebes" dalam *Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, tanggal 2 Agustus 1920, lembar ke-2.

³¹ PNRI, "Spoorwegen in Zuid Celebes...16 September 1920.

³²

dapat mengangkut 160.000 dan 70.000 jiwa, tidak termasuk penduduk yang tinggal di area persawahan.³³

Para ahli ekonomi telah menghitung keuntungan yang bisa diperoleh atas dibukanya jalur kereta api ini. Penafsiran biaya dan pengeluaran dari jalur Takalar-Makassar-Maros memberikan hasil eksploitasi yang menguntungkan. Hasil dari pengangkutan penumpang ditaksir sekitar f 180.000, pengangkutan barang f 75.000, penghasilan lain kira-kira f 16.000. Biaya eksploitasi setiap tahun berjumlah sekitar f 13.000 sehingga saldo untung ditetapkan f 100.000/ tahun.³⁴ Namun usaha untuk membangun jalur kereta api Makassar-Maros tidak pernah diwujudkan karena biaya investasi yang cukup besar sementara pertumbuhan ekonomi mengalami ketidakpastian.

Seorang anggota Volksraad yang bernama Mr. H. 's Jacob yang sejak awal bersikap kritis terhadap rencana pembangunan jaringan kereta api khususnya jalur Makassar-Maros, mempertanyakan beberapa hal yang sangat penting, misalnya; 1). Bagaimana masalah pembebasan tanah dan material yang digunakan?; 2). Apakah tidak ada kesulitan dalam pembebasan lahan yang akan menghambat pembangunan?; 3). Apakah prediksi bahwa jalur ini dapat memperoleh keuntungan sebesar f. 11/km sudah realistis?; 4). Mengapa semua kegiatan bagi pembangunan jalur kereta ini dihentikan?.³⁵

³³ PNRI, "Sporwegen in Zuid Celebes...16 September 1920.

³⁴ PNRI, "Sporwegen in Zuid Celebes...16 September 1920.

³⁵ PNRI, "Sporweg Makassar-Maros" dalam *Bataviaansch Nieuwsblad*, tanggal 22 Desember 1922, lembar ke-2.

Jawaban resmi pemerintah Belanda atas pertanyaan tersebut disampaikan dua bulan kemudian, yang dimuat oleh media massa yang terbit pada 23 Pebruari 1923. Bahwa terhadap pertanyaan pertama dan kedua pemerintah Belanda “membenarkan adanya kesulitan dan hambatan dalam upaya pembebasan tanah”. Untuk pertanyaan kedua dijawab dengan; “selama periode Juli-November 1922 rata-rata hasil dari eksploitasi jalur Takalar-Makassar per hari/kilometer mencapai f 8,91.

Berdasarkan hasil ini maka proyeksi laba yang dapat diperoleh pada jalur Makassar-Maros sebesar f.11 bisa diwujudkan”. Sedangkan pertanyaan keempat pemerintah berargumentasi bahwa “memang telah diputuskan untuk menunda sementara aktivitas pada jalur Maros. Penafsiran belakangan ini menunjukkan bahwa kelebihan eksploitasi bagi masa depan tidak mencukupi untuk bisa menjamin sepenuhnya modal yang dikeluarkan bagi pembangunan ini atas dasar bunga 6% dan pelunasannya”.³⁶

Bersamaan dengan bergulirnya politik balas jasa di awal abad ke-20 kekacauan situasi politik dan ekonomi mulai merebak. Kebijakan-kebijakan baru pun mulai bermuncullan. Pada bulan Juli 1908 keresahan muncul di Cenrana, Camba dan Mallawa akibat ulah para pemungut pajak yang memaksa rakyat untuk membayar pajak dan mengikuti cacah jiwa. Rakyat yang merasa asing dengan sistem pajak baru tersebut menolak. Rakyat menduga bahwa sensus hanya

³⁶ PNRI, “Sporweg Makassar-Maros” dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, tanggal 20 Februari 1923, lembar ke-2.

sebuah cara semata untuk mendata warga yang kemudian akan dijadikan pekerja paksa pada lahan-lahan pertanian dan perkebunan milik pemerintah Belanda yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatra. Beberapa tokoh lokal mencoba memprovokasi rakyat agar tidak memenuhi kewajiban membayar pajak. Ia beralasan bahwa di tengah kemunduran ekonomi dan ketidakpastian hasil pertanian adalah tidak patut memaksakan berlakunya sebuah instrumen baru pada saat rakyat tidak mampu memenuhinya.³⁷

Dalam sebuah laporan yang terbit di tahun 1924 yang kemudian dirilis oleh *De Makassar Courant* terdapat beberapa tindakan kejahatan yang membuat Onderafdeeling Maros menjadi tidak aman. Adalah I Tolo Daeng Magassing, sosok terkenal yang memimpin kelompok kecil tenaga berpengalaman kelahiran Limbung Gowa, membuat resah dan mengancam eksistensi pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda berupaya keras untuk menangkap tokoh ini. Dalam sebuah operasi militer yang melibatkan pasukan marsose, Tolo dan kawan-kawan akhirnya ditangkap dan kemudian ditembak mati. Mayatnya diperlihatkan di depan umum dengan tujuan untuk mencegah terulangnya kejahatan, yang mungkin bisa kembali terjadi oleh para pengikutnya dan agar orang bisa membencinya untuk tidak menghormatinya lagi.³⁸

Dalam sumber-sumber Belanda Tolo dan anggotanya disebut sebagai “gerombolan perampok” yang dengan

³⁷ *Koloniaal Verslag 1908* (1908: 64).

³⁸ PNRI, “Het rooverwezen op Celebes” dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, tanggal 16 Juli 1924, lembar ke-3.

kejahatannya bisa menyadarkan orang untuk bangkit melakukan perlawanan terhadap Belanda. Kelompok ini pada tahun 1922-1924 memperluas daerah operasi, ke luar wilayah Tanralili sehingga Belanda makin sulit mengatasinya. Pemerintah Belanda di Batavia mengirim Komisaris Pemerintah Koenen ke Makassar untuk melakukan penyelidikan dan merancang tindakan terhadapnya.³⁹ Kelompok ini sulit dilumpuhkan karena para pemimpinnya adalah para bangsawan berpengaruh.

Setelah Tolomeninggal pemimpin kelompok diambilalih oleh Jabarang dengan membangun basis kekuatannya di pegunungan Tanralili. Sementara pemimpin sektor kota dan wilayah sekitarnya dipegang oleh seorang bangsawan Turikale. Kontrolir Maros Spoor berhasil menangkap kedua gerombolan ini. Dari perspektif Belanda hal ini melegakan bagi penduduk dan menjadi suatu prestasi besar bagi aparat.⁴⁰ Kelompok Jabarang telah menyerang sebuah rumah yang terletak di dekatnya sebagai tindak kejahatan terakhirnya, menyeret keluar pria dan wanita, dan di samping itu juga merampas barang-barang yang kalau dijumlahkan bernilai sekitar f. 275. Pria itu berhasil mengenal beberapa anggota gerombolan sehingga memungkinkan Kontrolir Spoor melumpuhkan mereka.⁴¹

Pada tahun 1928 pajak *landrente* (pajak tanah) mulai

³⁹ PNRI, "Het rooverwezen op Celebes" ...16 Juli 1924.

⁴⁰ PNRI, "Het rooverwezen op Celebes" ...16 Juli 1924.

⁴¹ PNRI, "Het rooverwezen op Celebes" ...16 Juli 1924.

diberlakukan di Pulau Sulawesi dan sekitarnya.⁴² Akibat penerapan pajak ini banyak dijumpai para pejabat pribumi yang melakukan penggelapan dan pemerasan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang lebih besar. Pada tahun 1929, misalnya seorang tokoh penting dalam masyarakat adat yang berprofesi sebagai panitera Pengadilan Maros bernama Abdul Rachman melakukan penggelapan dan tindak kekerasan. Pengadilan yang memproses perkaranya akhirnya menjatuhkan hukuman penjara selama 2,5 tahun.⁴³

Setahun setelah kasus ini merebak ke publik muncul pula kasus lain yang dalam perspektif pemerintah Belanda dikelompokkan sebagai kejahatan. Dalam harian *Soerabajasch Handelsblad* yang dikutip oleh *Bataviaasch nieuwsblad* edisi 17 Januari 1929 diberitakan mengenai teror kejahatan yang terjadi di Maros yang dilakukan oleh Karaeng Manemba, yang mengaku keturunan Karaeng Data yang terkenal pada abad lalu. Gerakan Karaeng Data yang terjadi di Kerajaan Gowa pada abad ke-18 telah memberi inspirasi bagi Karaeng Manemba untuk mengembangkan gagasan mesianisme di Onderafdeeling Maros. Bentuk gerakan ini mengadopsi nilai-nilai keislaman sufistik yang beraras pada upaya “membersihkan daerah dari anasir asing yang kafir dan ingin mengembalikan roh kekuasaan itu ke tangan mereka”.

Selama beberapa tahun, kelompok ini melakukan gerakannya dengan cara yang lebih ekstrim seperti

⁴² PNRI, “Landrente” dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, tanggal 11 Februari 1928, lembar ke-2.

⁴³ PNRI, “Maros Affair” dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, tanggal 22 Oktober 1929, lembar ke-3.

perampokan (*roverwezen*), pencurian, pembunuhan dan pemerasan, sehingga pemerintah Belanda memasukkan mereka sebagai tindakan kriminal dengan ancaman pidana yang berat. Pemerintah Belanda kesulitan memberantas kelompok ini meskipun Daeng Manemba, sang tokoh gerakan, berhasil ditangkap bersama dua orang saudaranya. Setidaknya ada 30 perkara yang dituduhkan kepadanya.⁴⁴

Jika diamati laporan-laporan pemerintah menyangkut gerakan-gerakan rakyat ini, jelas terdapat perbedaan motif, bentuk, cara, strategi dan kecenderungan yang mendorong terjadinya gerakan. Gerakan tersebut yang dapat kita kategorikan sebagai episode perlawanan rakyat, namun dalam perspektif pemerintah Hindia Belanda dinyatakan sebagai tindakan perampokan, kelompok perampok (*roverpartij*), kelompok liar (*bende*), gangguan keamanan (*rustverstoring*), pembalasan dendam (*wraakoefening*). Tindakan dan kegiatan yang bertentangan dengan pihak yang berkuasa atau tata tertib masyarakat ini digolongkan dalam gerakan perampokan.⁴⁵

⁴⁴ "Soort over sort", dalam *Bataviaasch nieuwsblad*, tanggal 17 Januari 1929, lembar ke-3

⁴⁵ Edward L. Poelinggomang. *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan. Makassar, 1906-1942*. (Jogjakarta: Ombak, 2004: 152-153).



Bab IV

KESIMPULAN



Onderafdeling Maros yang meliputi 16 masyarakat adat menunjukkan relasi antar masyarakat adat yang demikian cair. Pada kenyataannya kesatuan dalam masyarakat adat dengan para kepala kampung bawahannya hanya diikat oleh pertalian keluarga. Misalnya, kelompok federasi yang berada di dataran utara Maros seperti Toddo Lima yang dipimpin Turikale (beranggotakan Marusu, Tanralili, Lau, Bontoa, Simbang dan Turikale) hanya sekedar menjadi kepala administrasi saja, dengan tujuan utama untuk kepentingan diri sendiri.

Federasi Appaka di selatan yang membawahi Bira, Biringkanaya, Sudiang dan Moncongloe serta negeri-negeri yang berada di daerah pegunungan seperti Camba, Cenrana, Mallawa, Gantarang Matinggi, Wanuwawaru dan Laiya. Distrik-distrik yang sudah dibentuk tersebut berkembang pesat, kemudian timbul beberapa distrik baru yang dipimpin seorang Sulewatang. Dengan demikian timbul di sebelah timur Distrik Lau, di sebelah barat Distrik Raya dan di sebelah selatan Distrik Timboro.

Ketika orang-orang Belanda yang mulai tinggal di Maros menyaksikan bahwa tidak ada lagi pemerintahan yang teratur di wilayah Lomo dan segera banyak orang di wilayah vassal yang berpindah ke Benteng Valkenburg Maros. Kebanyakan yang pindah ini adalah orang-orang Turikale yang kemudian berkembang jumlahnya hingga pemerintah Belanda mengangkat seorang Gallarang sebagai kepala atas mereka yang kemudian gelar tersebut diganti dengan istilah "karaeng".

Kekuasaan para karaeng dapat bertahan karena dukungan bangsawan lokal dan elite-elite lainnya yang ditopang oleh kekuatan asing, dan mengalami perubahan ketika tantangan dan ancaman datang karena kepentingan kelompok pendukung tidak terakomodasi ke dalam kekuatan nyata sehingga menyimpan potensi ketidakstabilan politik. Perbedaan sikap antarelite tentang model hubungan eksternal telah memunculkan friksi antarkelompok, menyangkut cara pandang mereka terhadap struktur kekuasaan yang ada.

Para elite dan orang-orang di sekitar karaeng yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan "karaeng penguasa" memberi dukungan atas kebijakan karaeng selaku pemimpin daerah adat (*adatgemeenschap*) dan penguasa wilayah berkolaborasi dengan pemerintah Belanda untuk ikut serta dalam pemerintahan lokal termasuk, misalnya dalam pengelolaan pajak, penghitungan jumlah cacah jiwa dan perdagangan.

Tindakan pencurian dan perampokan yang marak terjadi di awal abad ke-20 merupakan dampak krisis ekonomi

dan kemiskinan. Krisis ini juga tidak lepas dari gangguan keamanan akibat aksi militer Belanda di bulan Juli-Agustus 1905 hingga permulaan tahun 1906 yang memaksa pemimpin-pemimpin lokal untuk menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah Hindia Belanda sebagai penguasa atasannya sehingga merusak usaha-usaha perekonomian rakyat.

Di Distrik Camba misalnya, pada 4 Agustus 1905 rakyat harus menghentikan aktivitasnya dan mengungsi ke tempat aman untuk menghindari operasi militer yang sedang digelar. Komandan pasukan militer Belanda Letnan-1 Gustdorf menyisir wilayah ini untuk mengusir orang-orang Bone yang diperkirakan berjumlah 5.000 orang. Mereka ini menjadikan Camba sebagai basis pertahanan untuk menghalau gerak maju pasukan yang hendak menduduki Bone. Kontak senjata terjadi pada 6 Agustus 1905, dan pasukan militer Hindia Belanda terus disiagakan dengan menugaskan Kapten Schey dan Letnan Gusdorf untuk memantau distrik ini.

Penataan pemerintahan adat oleh pemerintah Hindia Belanda pasca ekspedisi militer di tahun 1905 mengakibatkan disparitas kekuasaan berkembang dan merasuk dalam struktur pemerintahan tradisional secara bersama. Semua institusi adat yang bernama wilayah adat yang dipimpin oleh karaeng atau gallarang diubah bentuknya menjadi cabang pemerintahan (*onderafdeeling*) yang dipimpin oleh seorang Eropa (Belanda) dengan gelar kontrolir. Setiap *onderafdeeling* terbagi lagi dalam beberapa distrik, seperti Distrik Turikale, Distrik Lau, Distrik Raya, Distrik Marusu, Distrik Tanralili dan seterusnya yang masing-masing dipimpin oleh seorang

bangsawan bumiputera bergelar regent. Setiap regent membawahi beberapa Kepala Kampung.

Dampak dari pengaturan ini mengakibatkan banyak di antara para bangsawan tersisih dari panggung kekuasaan. Hal ini bertambah rumit karena para bangsawan yang sudah terbiasa menikmati hak-hak istimewa tereduksi dengan sistem baru yang membuat mereka kehilangan kekuasaan ekonomi, politik, wibawa, dan otoritas tradisionalnya.

Banyak di antara para bangsawan yang menunjukkan ketidaksenangan terhadap restrukturisasi pemerintahan itu melalui berbagai cara. Reaksi yang paling umum adalah berupa gerakan perlawanan, misalnya dengan menentang pemungutan pajak. Tindakan tegas diambil pemerintah Hindia Belanda terhadap mereka yang menentang adalah hukuman pembuangan sedangkan kepada mereka yang memberi dukungan atas kebijakan kolonial diberi jabatan-jabatan baru yang sesuai.

Dari perspektif kepentingan kolonial, restrukturisasi dapat mencegah munculnya gerakan perlawanan di kalangan penduduk. Namun, justru berpotensi melahirkan kerawanan baru karena tidak terakomodasinya sebagian besar para bangsawan yang dulu pernah berperan dalam masyarakat adat. Para bangsawan yang terpentil ini gigih menentang penetrasi kolonial, tidak mendapatkan posisi apapun dalam sistem baru tersebut.

Setelah restrukturisasi, kedudukan karaeng atau para bangsawan tidak lagi ditentukan oleh loyalitas bawahannya dan oleh persekutuan dengan penguasa di sekitarnya. Dalam

masa transisi kepala-kepala masyarakat adat atau kepala distrik terperangkap di antara sistem politik tradisional dan tatanan kolonial baru. Mereka sebagian tidak terbiasa dengan pemerintahan kolonial dan kurang siap melaksanakan tugas-tugas administratif. Yang paling penting, mereka diharapkan dapat menjaga keamanan dan ketertiban dalam distrik masing-masing.

Untuk menjaga keamanan wilayah seringkali Kontrolir Maros Spoor menunjuk orang-orang tertentu menjadi mata-mata, dan pekerjaan-pekerjaan khusus yang tidak bisa diselesaikannya seorang diri. Pada tahun 1924 misalnya, Spoor menggunakan Daeng Mangemba, putra regen Tanralili, sebagai mata-mata. Walaupun orang ini sering melakukan tindak kriminal seperti perampokan, pencurian, pembunuhan dan pemerkosaan pada tahun-tahun sebelumnya, namun penghormatan para bangsawan terhadapnya amat tinggi. Hal ini bukan karena Daeng Mangemba seorang penjahat tapi karena ia seorang pemberani, pemimpin perampok yang ditakuti dan dikagumi.

Tampak bahwa pengelola kekuasaan bertumpu pada dua poros utama kekuatan, yaitu yang bersumber pada karaeng, dan dari pemerintah Belanda. Kekuasaan yang bersumber dari para bangsawan yang mewujud dalam diri para karaeng berada dalam posisi yang lemah sedangkan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda bersifat dominan.

Para karaeng yang bermain di arena politik menampilkan diri sebagai pribadi dan wakil kelompok dalam panggung yang berbeda. Jaringan politik yang sudah

terbentuk melalui kontak antarelite membawa pengaruh pada terciptanya sebuah pemahaman baru bagi terwujudnya negara yang bebas dari intervensi asing.

Rakyat dan para karaeng mempunyai kemampuan membuat keputusan untuk bersekutu dan berseteru dengan kekuatan asing. Mereka bertindak dalam konteks kultural dan struktural di mana berbagai pertimbangan, keyakinan, dukungan sumberdaya membentuk perilaku mereka. Dengan cara dan keyakinan yang sistematis untuk berubah, para karaeng yang berkuasa mencoba mempengaruhi dengan menunjukkan cara-cara baru memahami perubahan struktur yang terjadi. Karaeng membutuhkan loyalitas dan dukungan rakyat untuk mewujudkan tata kehidupan yang dibangunnya, termasuk apakah menerima atau menolak penetrasi kekuasaan kolonial.



Baliho propaganda Jepang

Komunitas China misalnya, diijinkan tinggal dan mengembangkan usaha perdagangan dan jasa dengan menerima pengangkatan Liem Thiang Po (seorang partikelir) sebagai Letnan China di Maros pada 1904.¹

1 PNRI, "Bestuur over Vreemde Oosterlingen" dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, tanggal 7 Maret 1904, lembar ke-2.

DAFTAR PUSTAKA



Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Jakarta

Besluit No. 10 tanggal 17 Juli 1824.

Besluit No. 14 tanggal 7 Maret 1868.

Besluit No. 33 tanggal 24 Januari 1906

Besluit Nomor 31 tanggal 9 Maret 1906

“Nota van Overgave der Afdeeling Noorderdistricten op 24 Juni 1910, W.C. Van der Meulen Reel no. 32, MvO serie 1e.

Memorie van Overgave van de Controleur Onderafdeeling Maros A.S.L. Spoor, 16 Maret 1926, reel no. 32, serie 1e.

Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Makassar

W.G. van Der Wolk, “Kort Apercu Betreffende de Onderafdeling Maros” dalam Memorie van Overgave W.G. der Wolk, Controleur van Maros, 1946-1947. Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Margariet M. Lappia, (Makassar: Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2006).

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) Jakarta

“Moordberichten uit Celebes”, dalam De Locomotief, tanggal 28 April 1900.

“De moord op den Heer Muller” dalam De Locomotief, tanggal 4 Mei 1900.

- De Locomotief, "Moordzaak opzichter Muller te Maros", 7 September 1900.
- "Uit Buitenzorg" dalam De Locomotief, tanggal 16 Oktober 1900.
- "Een opstootjes" dalam De Locomotief, tanggal 13 November 1900.
- "Het opstootjes te Maros" dalam De Locomotief, tanggal 21 November 1900.
- "Een executie", dalam Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie, tanggal 21 April 1902.
- "Diverse Berichten" dalam De Locomotief, tanggal 17 April 1902.
- H. van Kol Soerabajasch Handelsblad, tanggal 14 Juni 1902.
- "Maccasarsche belangen" dalam Soerabajasch Handelsblad, tanggal 29 September 1902.
- "Gouvernement beschikking" dalam Bataviaasch Nieuwsblad, tanggal 24 Oktober 1902.
- "Ziekten" dalam Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie, tanggal 7 Desember 1904.
- "Bestuur over Vreemde Oosterlingen" dalam Bataviaasch Nieuwsblad, tanggal 7 Maret 1904.
- "De Week" dalam Soerabajasch Handelsblad, tanggal 9 September 1905.
- M. Van Geuns dalam Harian Soerabajasch Handelsblad, tanggal 9 September 1905.
- "De regeling der heerendiensten in Zuid Celebes" dalam Soerabaja Handelsblad, tanggal 7 Oktober 1905.
- "Politiek Verslag van Celebes en Onderhoorigheden over et Jaar 1934", serie 4e Reel No. 7, Mailrapport No. 656 geh/35.
- Koloniaal Verslag 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1914, 1915, 1916, 1918, 1924 (Gedrukt ter Algemeene Landsdrukkerij. Bataviaaschap van Kunsten en Wetenschappen).
- "De ijzeren baan op Celebes" dalam Het Nieuws van den dag

voor Nederlandsch Indie, tanggal 2 Agustus 1920.

“Spoorwegen in Zuid Celebes” dalam Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie, tanggal 16 September 1920.

“Spoorweg Makassar-Maros” dalam Bataviaasch Nieuwsblad, tanggal 22 Desember 1922.

“Spoorweg Makassar-Maros” dalam Bataviaasch Nieuwsblad, tanggal 20 Februari 1923.

“Het rooverwezen op Celebes” dalam Bataviaasch Nieuwsblad, tanggal 16 Juli 1924.

“Landrente” dalam Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie, tanggal 11 Februari 1928.

“Maros Affair” dalam Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie, tanggal 22 Oktober 1929.

Buku-buku:

Abdullah, Taufik.

1987 “Dari Sejarah Lokal ke Kesadaran Nasional: Beberapa Problematik Metodologis”, T. Ibrahim Alfian, H.J. Koesoemanto, Dharmono Hardjowidjono, Djoko Suryo (ed.), Dari Babad dan Hikayat Sampai Sejarah Kritis. (Jogjakarta: Gadjah Mada University Press).

Andaya, Leonard Y.

2004 Warisan Arung Palakka. Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17. (Makassar: Inninawa, 2004: 157-158). Diterjemahkan dari The Heritage of Arung Palakka: A History of South Sulawesi (Celebes) in the Seventeenth Century. (The Hague Martinus Nijhoff, 1981. Verhandelingen KITLV, 91. KITLV, Leiden, The Nederland) oleh Nurhady Sirimorok.

Andrian, Charles F.

1992 Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial. (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana). Diterjemahkan dari Political Life and Social Change oleh Luqman Hakim.

Aspar, Muhammad

2011 Sejarah Kekeraengan Bontoa di Maros. (Makassar: Pustaka Refleksi).

Cummings, William

2015 Penciptaan Sejarah Makassar di Awal Era Modern. (Jogjakarta: Ombak). Diterjemahkan dari Making Blood White Historical Transformation in Early Modern Makassar. (Honolulu: University of Hawaii Press, 2002) oleh Windu Yusuf).

Gibson, Thomas.

2009 Kekuasaan, Raja, Syeikh, dan Amtenaar. Pengetahuan Simbolik dan Kekuasaan Tradisional Makassar 1300-2000. (Makassar: Innawa). Diterjemahkan dari The Sun Pursued the Moon: Syimbolic Knowledge and Traditional Authority Among the Makassar. (Honolulu: University of Hawaii Press, 2005) oleh Nurhady Sirimorok.

Poelinggomang, Edward L.

2004 Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan. Makassar, 1906-1942. (Jogjakarta: Ombak).

Sills, David L., (ed).

1972 International Encyclopedia of the Social Sciences. (The Macmillan Company and The Free Press, New York, Collier-Macmillan Publisher, London. Volume 14).

Tentang Penulis



Simon Sirua Sarapang, lahir di Palopo, 28 Desember 1966. Menyelesaikan sekolahnya di SD GKST Immanuel Palu Sulawesi Tengah (1979), SMP Negeri 1 Palu Sulawesi Tengah (1982), dan SMA Cokroaminoto Palopo Sulawesi Selatan (1985). Ia kemudian melanjutkan kuliahnya di Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin (1994) dan Program Magister Museologi di Universitas Padjadjaran (2009).

Pada tahun 1996-1998, bekerja sebagai Tenaga SP3K (Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan Bidang Kebudayaan) di Kecamatan Bazartete Kabupaten Liquisa Timor Timur. Tahun 1999-2001 menjadi Pembantu Pimpinan di Kantor Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Jayapura, Provinsi Irian Jaya. Saat ini bekerja di Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar.

Beberapa karyanya antara lain; *Sejarah Masuknya Injil di Pulau Asei Besar Sentani Papua* (1999), *Bangunan Kolonial di Sentani Papua* (2000), *Pongsimpin, Tokoh Pejuang dari Pantilang Luwu* (2002), *Sejarah Daerah Enrekang* (2003), *Kerajaan Gowa 1900-1942* (2004), *Andi Makkasau* (2005), *Sejarah Kerajaan Tallo*

(2006) dan *Museum Batara Guru Istana Kerajaan Luwu* (2014).

Beberapa seminar yang pernah diikutinya antara lain: Penataran Kesejarahan Tingkat Dasar (2002) di Jakarta, Penataran Kesejarahan Tingkat Lanjutan (2004) di Jakarta, Panitia Seminar Internasional La Galigo di Masamba Luwu Utara Sulawesi Selatan (2004), Panitia Lawatan Sejarah Tingkat Nasional III di Makassar (2005), Ketua Panitia Lawatan sejarah Daerah Makassar (2004 dan 2006), Peserta Lawatan Sejarah Tingkat Nasional IV di Bangka Belitung Pangkal Pinang (2006) dan Seminar Nasional Hasil Penelitian di Aceh (2011)



ONDERAFDEELING

MAROS

KONFIGURASI ELITE &
KONTESTASI KEKUASAAN
1900-1946

Buku ini diarahkan untuk mengembangkan kajian sejarah politik lokal dengan fokus pada dinamika dan kontestasi politik antarelite. Pendekatan yang lebih "berorientasi ke dalam" (more endogenously oriented) ini memperlihatkan karakteristik yang amat variatif, antara soku dan seteru, integrasi dan perubahan. Dalam proses integrasi terjadi pertarungan (kontestasi) kepentingan antarelite yang berakibat pada munculnya ketidakharmonisan hubungan antarelite dan antarakyat, sehingga terjadi transformasi politik dan sosial. Kontinuitas dan perubahan yang terjadi tak akan bisa dimengerti apabila sejarah dalam ruang yang kecil ini (Maros) dan tempat yang dekat dengan pusaran politik regional (Makassar) ini tidak dimunculkan melalui wacana akademik.

Dan perspektif sejarah struktural, buku ini mencoba menjelaskan hubungan di antara struktur-struktur sosial yang berbeda, memperlihatkan kegiatan yang dilakukan oleh struktur, memahami dampak kebijakan pemerintah kolonial dalam mendinamisir distribusi kekuasaan.

Karenanya, buku ini sangat penting, khususnya untuk melihat bagaimana figurasi elite dan kontestasi kekuasaan di Onderafdeeling Maros antara rentu waktu 1900-1946.

Perpustakaan
Jenderal

ISBN 978-602-7276-26-4



9 786029 248364